



**KRISIS POLITIK VENEZUELA DI ERA NICOLAS MADURO
TAHUN 2013-2019**

*(VENEZUELA POLITICAL CRISIS IN THE NICOLAS MADURO ERA
2013-2019)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

Agista Saraswati Malaysianto

NIM 150910101040

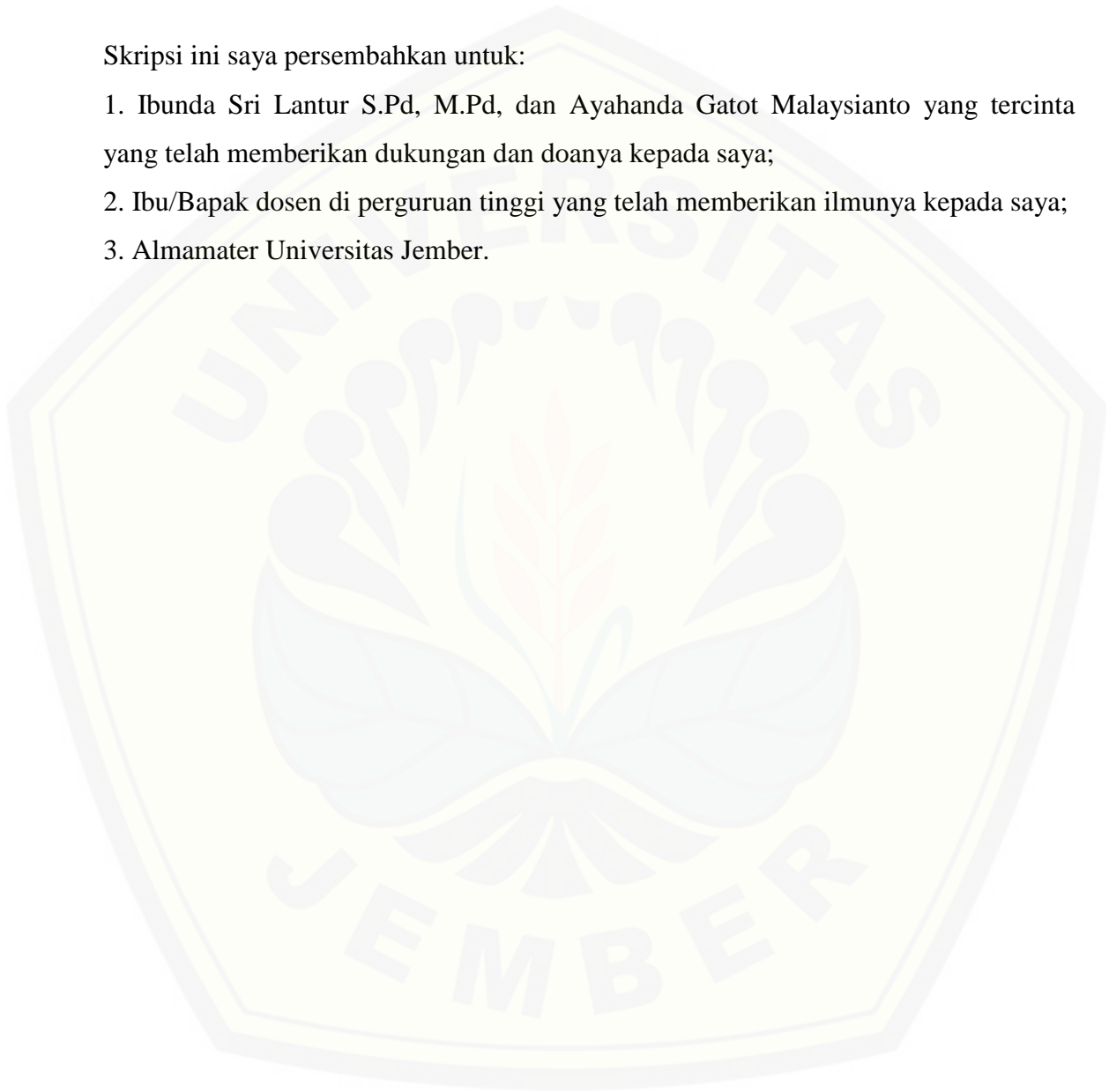
**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sri Lantur S.Pd, M.Pd, dan Ayahanda Gatot Malaysianto yang tercinta yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada saya;
2. Ibu/Bapak dosen di perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya kepada saya;
3. Almamater Universitas Jember.



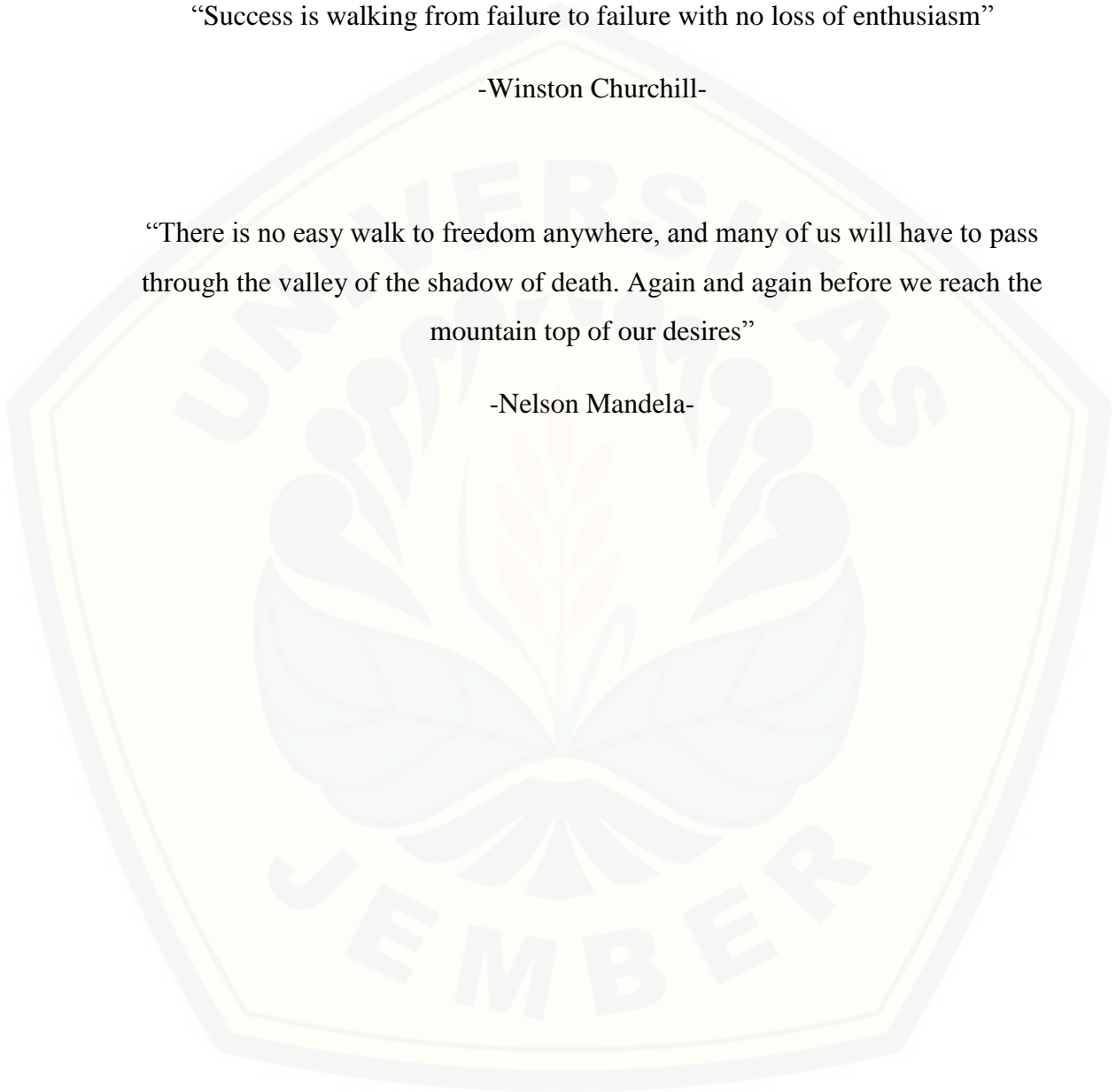
MOTTO

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm”

-Winston Churchill-

“There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the mountain top of our desires”

-Nelson Mandela-



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agista Saraswati Malaysianto

NIM : 150910101040

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis ilmiah saya yang berjudul “Krisis Politik Venezuela Di Era Nicolas Maduro Tahun 2013-2019” merupakan murni dan benar-benar karya tulis saya sendiri. Adapun beberapa substansi yang menjadi rujukan saya telah ditandai dengan pengutipan dan penyertaan nama penulis/sumber kutipan. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan hasil plagiarisme karya ilmiah lain. Dengan berdasarkan aturan penulisan karya ilmiah, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dan kebenaran penulisan ini.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya siap mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Januari 2020

Yang menyatakan,

Agista Saraswati Malaysianto

NIM 150910101040

SKRIPSI

**KRISIS POLITIK VENEZUELA DI ERA NICOLAS MADURO
TAHUN 2013-2019**

***(VENEZUELA POLITICAL CRISIS IN NICOLAS MADURO ERA
2013-2019)***

Oleh

AGISTA SARASWATI MALAYSIANTO

NIM 150910101040

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

: Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota

: Drs. Supriyadi, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Krisis Politik Venezuela Di Era Nicolas Maduro Tahun 2013-2019” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 7 Januari 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua, Dra. Sri Yuniati, M.Si NIP 196305261989022001		Anggota I Fuat Albayumi , SIP. MA NIP 197404242005011002
--	--	--

Mengesahkan,

Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

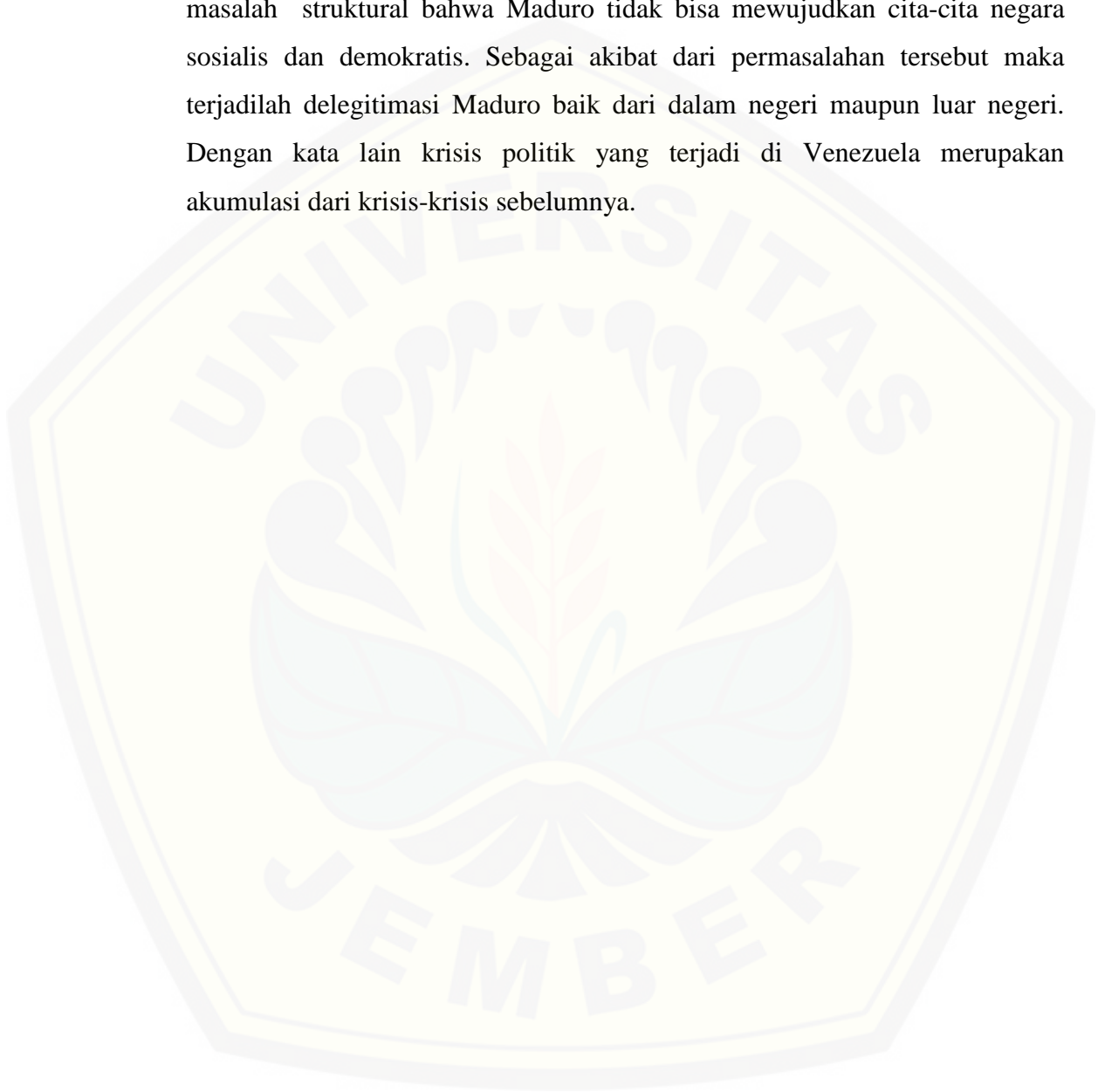
Krisis Politik Venezuela Di Era Nicolas Maduro Tahun 2013-2019; Agista Saraswati Malaysianto, 150910101040; 2020: 75 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Venezuela merupakan negara sosialis yang sangat berorientasi pada pendapatan ekspor minyak. Sejak masa kepemimpinan Hugo Chavez tahun 1999-2013, Venezuela menjadi negara yang makmur. Pasalnya pendapatan negara menjadi sangat besar dari minyak dan Chavez memiliki visi-misi Bolivarian untuk mensejahterakan rakyat. Tahun 2013 Hugo Chavez meninggal dan digantikan oleh Nicolas Maduro. Maduro adalah sosok orang yang sangat mengagumi Chavez, sehingga ia melanjutkan visi misi Bolivarian dari pendahulunya. Pada awal pemerintahan Maduro sangat dicintai oleh rakyatnya sama seperti rakyat mencintai Chavez. Namun tidak lama setelah menjabat menjadi presiden Venezuela, Maduro dituntut untuk turun dari jabatannya oleh pihak oposisi dan rakyat. Berdasarkan latar belakang di atas maka skripsi ini akan membahas tentang mengapa terjadi krisis politik di Venezuela pada masa kepemimpinan Nicolas Maduro.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dengan cara studi pustaka. Data ini bisa berasal dari media internet dalam rupa jurnal, buku, sumber berita, dan laporan. Data yang digunakan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis krisis politik di Venezuela adalah *resource-curse* dan *crisis theory*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa krisis politik di Venezuela disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagai pemimpin negara Maduro telah mengalami kegagalan dalam manajemen *resource*-nya. Selain itu Maduro

mengalami permasalahan pembangunan terkait penurunan GDP, kemiskinan meningkat dan menurunnya produksi serta perdagangan. Kemudian terdapat masalah struktural bahwa Maduro tidak bisa mewujudkan cita-cita negara sosialis dan demokratis. Sebagai akibat dari permasalahan tersebut maka terjadilah delegitimasi Maduro baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kata lain krisis politik yang terjadi di Venezuela merupakan akumulasi dari krisis-krisis sebelumnya.



PRAKATA

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas limpahan harmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Krisis Politik Venezuela Di Era Nicolas Maduro Tahun 2013-2019 ” dengan baik. Karya tulis ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Terselesaikannya karya tulis ini tidak lepas dari dukungan-dukungan beberapa pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada:

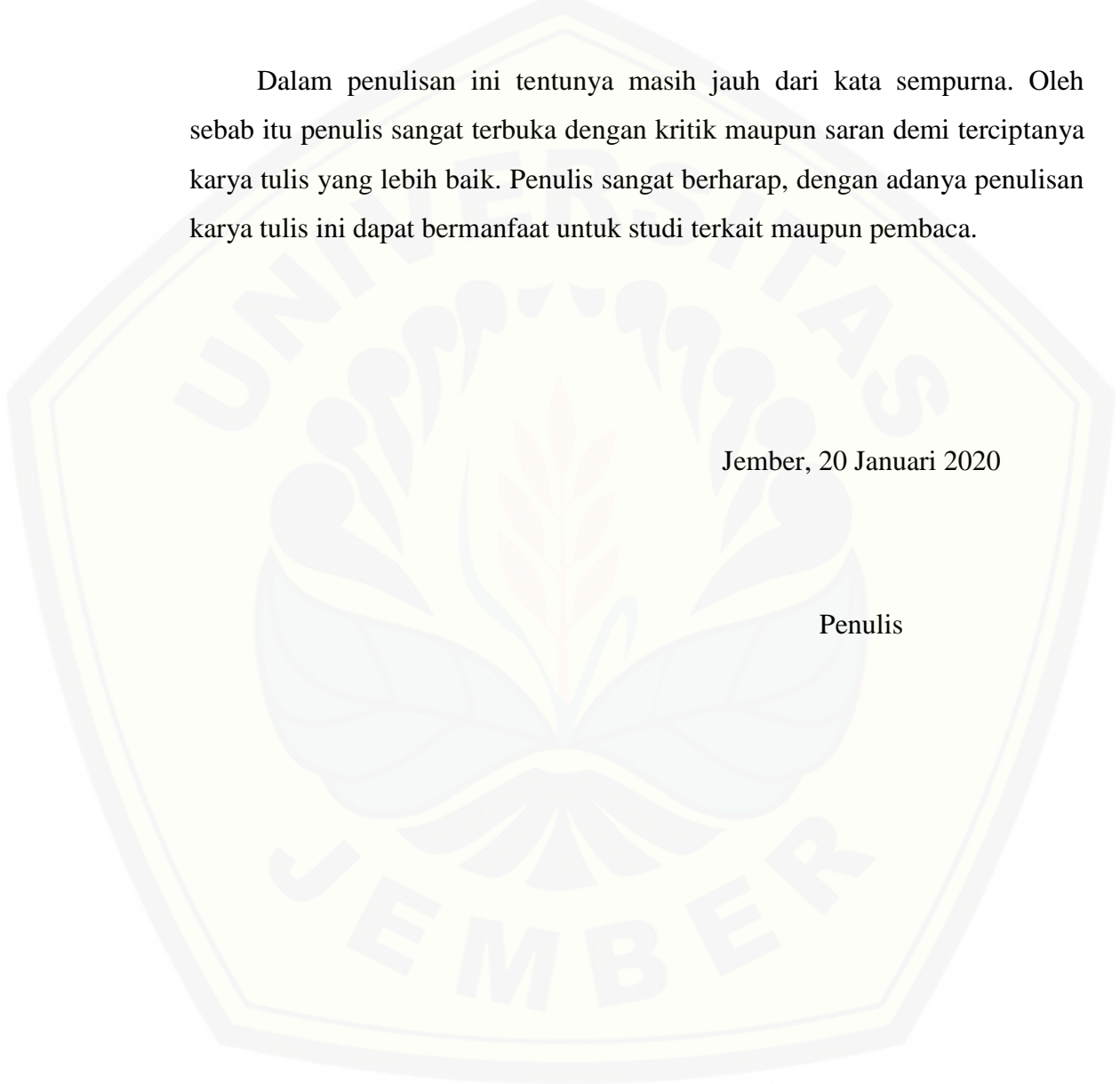
1. Dosen Pembimbing Utama, Dr. Muhammad Iqbal S.Sos, M.Si dan Pembimbing Anggota, Drs. Supriyadi M.Si yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyelesaikan karya tulis ini;
2. Honest Dody Molasy, S.Sos, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik karena berkat dorongan dan motivasinya, saya mampu untuk segera menyelesaikan karya tulis ini;
3. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada saya;
4. Kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Gatot Malaysianto dan Ibunda Sri Lantur S.Pd, M.Pd serta keluarga besar yang selalu memberikan *support* serta doanya kepada saya;
5. Sahabat-sahabat dan teman-teman di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember angkatan 2015 yang telah menemani dan berjuang bersama selama masa kuliah;

6. Terakhir adalah kepada pihak-pihak yang secara tidak langsung telah memberikan saya semangat untuk segera lulus kuliah dengan pertanyaan “semester berapa sekarang ?” dan “kapan lulus ?”.

Dalam penulisan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat terbuka dengan kritik maupun saran demi terciptanya karya tulis yang lebih baik. Penulis sangat berharap, dengan adanya penulisan karya tulis ini dapat bermanfaat untuk studi terkait maupun pembaca.

Jember, 20 Januari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.3.1. Batasan Materi	5
1.3.2. Batasan Waktu	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Kerangka Konseptual	6
1.5.1. <i>Resource-Curse Theory</i> (Teori Kutukan Sumber Daya)	7
1.5.2. <i>Crisis Theory</i> (Teori Krisis)	8
1.6. Argumen Utama	12
1.7. Metode Penelitian	13
1.7.1. Pendekatan Metodologi Penelitian	13
1.7.2. Teknik Pengumpulan Data	14
1.7.3. Teknik Analisis Data	15
1.8. Sistematika Penulisan	15

BAB 2 VENEZUELA PADA MASA PEMERINTAHAN HUGO CHAVEZ	17
2.1. Venezuela Pra Pemerintahan Hugo Chavez	17
2.2. Kebangkitan Hugo Chavez	21
2.2.1. Kondisi Politik	23
2.2.2. Kondisi Ekonomi	27
2.2.3. Kondisi Hubungan Internasional	30
BAB 3 KRISIS POLITIK DI VENEZUELA	33
3.1 Krisis Politik dalam Lingkup Domestik	33
3.1.1 Demonstrasi dan Percobaan Kudeta	33
3.1.2 Kekalahan PSUV	35
3.2 Krisis Politik dalam Lingkup Internasional	37
3.2.1 Sanksi dunia internasional kepada Venezuela	37
3.2.2 Penunjukan Juan Guaido sebagai Presiden Sementara	39
BAB 4 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KRISIS POLITIK VENEZUELA	41
4.1 Kutukan Sumber Daya Minyak dan <i>Paradoks of Plenty</i>	41
4.2 Krisis Pembangunan	43
4.3 Krisis Struktural	47
4.4 Krisis Manajemen	53
4.5 Krisis Legitimasi	61
BAB 5 KESIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Venezuela Oil Production and Prices</i>	29
Gambar 2.2 <i>Population Under Poverty Line in Venezuela</i>	30
Gambar 3.1 Hasil pemilihan umum legislatif Venezuela Desember 2015.....	36
Gambar 4.1 Diagram grafik OPEC <i>Oil Prices</i> 2008-2018.....	43
Gambar 4.2 Persentase GDP per kapita Venezuela tahun 2013-2018.....	44
Gambar 4.3 Persentase Kemiskinan Venezuela 2013 -2018.....	46
Gambar 4.4 Produksi minyak Venezuela (mb/d).....	47
Gambar 4.5 Rata-rata Inflasi Venezuela 2013-2019.....	48

DAFTAR SINGKATAN

OPEC	: <i>Petroleum Exporting Countries</i>
PDVSA	: <i>Petroleos de Venezuelas S.A</i>
TRT	: <i>Thai Rak Thai</i>
PAD	: <i>Peoples Alliance for Democracy</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
AS	: Amerika Serikat
UE	: Uni Eropa
AD	: <i>Accion Democrática</i> / Aksi Demokratis
PCV	: <i>Partido Comunista de Venezuela</i> / Partai Komunis
COPEI	: <i>Comite de Organisation Politica Electoral Independiente</i> / Komite untuk Pemilihan Independen Politik Organisasi
PRP	: <i>Partindo Republicano Progesista</i> / Partai Republik Progresif
ORVE	: <i>Movimiento de Organization Venezolana</i> /Gerakan untuk Organisasi Venezuela
PDN	: <i>Democratico Nasional</i> / Partai Demokrat Nasional
FEI	: <i>Frente Electoral Independiente</i>
URD	: <i>Unión Republicana Democrática</i>
PCV	: <i>Partido Comunista de Venezuela</i>
MENI	: <i>Movimiento Electoral National Independiente</i>
IR	: <i>Integrasi Republicana</i>
PST	: <i>Partido Socialista de Trabajadores</i>
PS	: <i>Partido Socialista</i>
FND	: <i>Frente National Democrática</i>



<i>NCE</i>	<i>: National Council Electoral</i>
<i>IMF</i>	<i>: International Monetary Fund</i>
<i>PSUV</i>	<i>: United Socialist Party of Venezuela</i>
<i>NA</i>	<i>: National Assembly</i>
<i>UNASUR</i>	<i>: The Union of South American Nations</i>
<i>OAS</i>	<i>: Organization of American States</i>
<i>IACHR</i>	<i>: Inter-American Commission on Human Rights</i>
<i>SCJ</i>	<i>: Supreme Court of Justice</i>
<i>CNA</i>	<i>: Constituent National Assembly / Majelis Konstituante Nasional</i>
<i>CBV</i>	<i>: Central Bank of Venezuela</i>
<i>AI</i>	<i>: Amnesty International</i>
<i>EO</i>	<i>: Executive Order</i>
<i>FARC</i>	<i>: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : *Venezuela (Bolivarian Republic of)'s Constitution of 1999 with Amendments through 2009*81



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Venezuela merupakan salah satu negara pendiri OPEC¹. Tahun 2017 tercatat bahwa Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar (OPEC, 2017). Dari total keseluruhan cadangan minyak negara-negara OPEC 24,9 % berasal dari Venezuela. Artinya Venezuela mampu mengalahkan Saudi Arabia yang hanya memiliki cadangan minyak sebesar 21,9 % (OPEC, 2017). Oleh sebab itu minyak menjadi komoditi vital untuk Venezuela. Tercatat 95 % hasil ekspor minyak menjadi pemasukan pendapatan utama Venezuela. (BBC Indonesia, 2018).

Sebagai negara yang memiliki cadangan minyak terbesar, Venezuela memiliki sebuah badan yang memiliki tugas untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan *petroleum* di Venezuela. Badan ini bernama PdVSA. Di bawah PdVSA banyak berdiri perusahaan minyak baik dari dalam negeri maupun asing. Pada masa pemerintahan Hugo Chavez², PdVSA banyak melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing. Beberapa perusahaan terkena imbas dari nasionalisasi Chavez adalah ExxonMobil dari Amerika Serikat (AS). ExxonMobil merupakan salah satu perusahaan yang melakukan eksplorasi minyak di daratan *Orinoco Oil Belt*, Venezuela. Bersama dengan PdVSA, ExxonMobil menjalankan proyek Cerro Negro semenjak tahun 1990an. Proyek ini merupakan kerjasama PdVSA dan ExxonMobil untuk melakukan eksplorasi di *Orinoco Oil Belt*. Saham di dalam proyek Cerro

¹ OPEC merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang dibentuk pada Konferensi Baghdad tanggal 10-14 September 1960 yang dibentuk oleh Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi dan Venezuela. Tujuan OPEC adalah mengoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan dari negara-negara anggota untuk stabilitas pasar dan mengamankan kuota pasokan minyak agar tercipta pasar yang efisien, ekonomis dan teratur. Kini anggota OPEC mencapai 14 negara pengekspor minyak.

² Hugo Chavez merupakan Presiden Venezuela pada tahun 1999 – 2013. Chavez wafat pada Bulan Januari 2013. Ia merupakan pencetus Gerakan Revolusi Bolivarian.

Negro terbilang sama rata dengan persentase 41,6 % milik ExxonMobil, 41,6 % milik PDVSA dan sisanya dipegang oleh Veba Oel 16,67% (Dary, Hanin Nida, 2017). Semenjak nasionalisasi perusahaan minyak asing dilakukan, terjadi sebuah signifikansi pendapatan negara terutama yang berasal dari hasil ekspor minyak Venezuela. Dengan adanya nasionalisasi ini rakyat Venezuela bisa ikut dalam menikmati hasil kekayaan Venezuela.

Dalam memimpin Venezuela, Chavez menganut sistem demokratis-sosialis. Ia merupakan figur yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Pasalnya sebelum Chavez memimpin, Venezuela berada di bawah ideologi neo-liberal³ pada masa kepemimpinan Presiden Carlos Andres Perez tahun 1989. Pada masa jabatan pertama, Perez mendapatkan dukungan dari rakyat. Namun setelah masa jabatan keduanya, Perez banyak melakukan privatisasi industri milik negara dan juga banyak menghapuskan subsidi untuk rakyat sehingga mendorong rakyat untuk melakukan pemberontakan (Andrianto, 2012). Tahun 1982 Chavez membentuk sebuah Gerakan Revolusi Bolivarian⁴ untuk melawan rezim Perez kedua yang dinilai tidak pro rakyat. Peristiwa ini mengingatkan pada kudeta *Thaksin* di Thailand pada tahun 2006. *Thaksin* bersama dengan partai TRT yang mendapatkan dukungan penuh dari rakyat menengah kebawah karena janji kebijakannya yang pro rakyat. Hubungan *Patron – klien*⁵ digunakan untuk memenangkan hati rakyat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, *Thaksin* terlihat tidak menepati janjinya dibuktikan dengan elit menerapkan sistem neo-liberalisme dengan privatisasi, pemerintahan

³ Elizabeth Martinez dan Arnolde Garcia (1997) berpendapat bahwa Neo-liberal memiliki dasar hukum pasar. Bahwa pertama, setiap individu memiliki kebebasan modal, barang dan jasa sehingga mampu menciptakan sebuah kekayaan yang gagasannya ditujukan kepada rakyat miskin. Kedua, ideologi ini tidak segan dalam penghapusan pembelanjaan untuk pelayanan sosial kepada rakyat. Ketiga, deregulasi yang maknanya pasar diciptakan sesuai aturan setiap individu. Keempat, ideologi ini adalah tentang individualisme.

⁴ Revolusi Bolivarian merupakan sebuah konstitusi yang dicetuskan oleh referendum rakyat Venezuela. Revolusi ini berlandaskan visi misi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Venezuela dengan ideologi sosialis.

⁵ *Patron-klien* adalah sebuah hubungan antara patron (peran yang lebih tinggi) dengan klien (yang dianggap lebih rendah). Hubungan ini ditujukan agar patron mendapatkan dukungan dari klien dengan cara memberikan imbalan seperti perlindungan, bantuan maupun sesuai keinginan kepada klien.

diktator, konservatif, dan banyak aset yang dikuasai elit (Ungpakorn, 2007). *Patron-klien* yang diterapkan oleh *Thaksin* akhirnya tidak berfungsi lagi. Ditandai dengan adanya sebuah penolakan dan pertentangan dari Gerakan PAD. Gerakan ini yang memicu adanya kudeta pada *Thaksin*.

Tahun 1998 Hugo Chavez memenangkan pemilu dan mengubah dasar negara dengan Konstitusi Republik Bolivarian. Perubahan konstitusi ini didasari dengan Revolusi Bolivarian yang ia ciptakan. Revolusi ini sangat didukung rakyat karena dinilai pro rakyat. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Chavez dalam menasionalisasi perusahaan asing dibawah PDVSA dan tidak tunduk kepada negara adidaya. Rakyat dimanjakan dengan berbagai subsidi dan pembangunan besar-besaran kala itu.

Pada pemilu 2012, Chavez dan wakilnya, Nicolas Maduro, memenangkan pemilu presiden. Namun tepat sebelum pelantikannya, Chavez meninggal dunia di tahun 2013. Keberhasilan Chavez dalam menerapkan Revolusi Bolivarian ternyata masih menyisakan residu-residu positif pada rakyat. Pemilu ulang tahun 2013 dilaksanakan dan dimenangkan oleh Nicolas Maduro (Sofwan, 2018). Maduro berkeinginan untuk tetap meneruskan Revolusi Bolivarian dari pendahulunya. Dukungan penuh diberikan oleh rakyat kepada Maduro dibuktikan dari kemenangannya dalam pemilu 2013.

Namun pada tahun 2014 perlahan-lahan muncul sebuah reaksi secara simultan dari berbagai pihak terhadap kepemimpinan Maduro. Ditandai dengan munculnya demonstrasi terhadap Maduro yang terus meningkat. Februari 2014 demo yang berlangsung menewaskan 3 orang, 26 orang luka-luka dan 30 orang ditangkap. Pertentangan juga datang dari pihak oposisi yang menuntut Maduro meninggalkan jabatannya. Polaritas antara kedua pihak semakin menonjol. Pimpinan oposisi Leopoldo Lopez pun ditangkap dengan tuduhan konspirasi dan perencanaan kudeta terhadap pemerintah (BBC Indonesia, 2014). Sampai pertengahan Februari 2019 menurut organisasi HAM Venezuela Foro Penal tercatat setidaknya jumlah

tahanan politik mencapai angka 918 (*Congressional Research Service*, 2019). Tahun 2018 tercatat 2,3 juta warga Venezuela eksodus ke negara-negara tetangga seperti Brazil, Kolombia, Peru dan Meksiko. Eksodus ini diperkirakan akan terus meningkat (BBC Indonesia, 2018). Masifnya aktifitas eksodus ini menarik perhatian dunia internasional. *International Organization for Migration* (2018) menyatakan bahwa:

“Kebijakan pembatasan dan terjadinya kekerasan di perbatasan Brasil adalah peringatan bahwa krisis Venezuela membutuhkan solusi internasional. Masalah berkembang cepat, dan dunia akan menghadapi krisis baru seperti di Mediterania.”

Tahun 2018 Venezuela menyelenggarakan pemilu dan dimenangkan kembali oleh Maduro. Namun rakyat dan dunia internasional khususnya AS dan UE tidak memufakati hasil pemilu. Pada Januari 2019, AS beserta 53 negara (mayoritas UE, 15 negara belahan barat, Australia, dan Jepang) mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela secara sepihak (*Congressional Research Service*, 2019). Dengan keputusan secara sepihak ini, Maduro menilai keputusan yang diambil oleh negara-negara asing tersebut telah menciderai kedaulatan negara karena dikategorikan sebagai sebuah intervensi terhadap Venezuela.

Dengan penjabaran di atas, maka ada sebuah anomali yang terjadi. Bahwa Chavez dan Maduro adalah presiden yang sama-sama menerapkan Revolusi Bolivarian dan pada hakikatnya revolusi ini didukung oleh rakyat. Namun mengapa pada masa kepemimpinan Maduro justru banyak sekali pertentangan dari rakyat dan oposisi sehingga menyebabkan sebuah krisis politik di Venezuela ? Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis fenomena yang terjadi di Venezuela.

1.2. Rumusan Masalah

Pada subbab ini, rumusan masalah merupakan sebuah tolak ukur kelayakan atau urgensi sebuah penelitian. Bahwa ada sesuatu hal yang harus diungkap dibalik sebuah peristiwa. Sehingga penulis membuat

sebuah rumusan masalah: Mengapa terjadi krisis politik di Venezuela pada era Nicolas Maduro ?

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup bahasan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah penelitian. Ia berguna untuk membuat penulisan penelitian menjadi lebih terfokus pada tujuan. Ada 2 aspek utama dalam ruang lingkup bahasan yaitu batasan materi dan waktu. Pembagian ini ditujukan supaya data yang digunakan terfokus pada konteks permasalahan yang akan dianalisis.

1.3.1. Batasan Materi

Batasan ini membantu peneliti memperoleh data untuk dijadikan objek analisis. Supaya lebih terfokus peneliti akan menggunakan data berupa, pertama, latar belakang Venezuela dan pemerintahan Chavez. Kedua, krisis politik era Maduro. Ketiga, konsep krisis politik, teori *resource-curse* dan teori *crisis*. Kemudian ketiga materi tersebut akan dikaitkan satu sama lain untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.

1.3.2. Batasan Waktu

Batasan ini ditujukan untuk mengerucutkan peristiwa dalam jangka waktu tertentu. Menentukan batasan waktu akan bermanfaat dalam memfokuskan penelitian dalam mencari data.

Batasan waktu yang penulis gunakan adalah tahun 2013 sampai 2019. Pasalnya pada tahun 2013 merupakan tahun pertama Maduro mulai menjabat sebagai Presiden Venezuela. Sedangkan tahun 2019 terjadi peristiwa besar dengan diakuinya Juan Guaido sebagai presiden sementara oleh AS dan UE beserta aliansinya. Bahwasanya persetujuan pengangkatan ini tidak dikehendaki oleh pihak Maduro karena tidak melalui proses pemilu dan dianggap menciderai kedaulatan negara.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis alasan penyebab terjadinya krisis politik di Venezuela.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Pasalnya beberapa konsep yang digunakan oleh peneliti akan berguna menjadi sebuah alat analisis dalam mengungkap sebuah fenomena yang terjadi di Venezuela.

Dalam konsepnya, krisis politik tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai kegagalan sebuah kebijakan atau lemahnya kelembagaan atau aparatur negara. Namun krisis politik memiliki ciri utama adanya perjuangan kelas untuk memenangkan fungsi institusi. Krisis politik akut bisa terjadi karena adanya “blok kekuatan” yang disebabkan dari adanya ketidakjelasan fungsi dari masing-masing institusi (Jessop, 2014). Cerminan dari adanya “blok kekuatan” adalah adanya kekuatan dominan yang berusaha untuk memotong peran partai dan badan legislatif untuk mempengaruhi negara secara langsung. Jessop (2014) mengatakan bahwa krisis politik bisa tercermin pada krisis ideologi dominan yang biasanya diekspresikan dalam bentuk krisis legitimasi kekuasaan. Krisis politik juga bisa menjadi lebih buruk jika adanya krisis hegemoni atas rakyat.

Dalam pembahasan krisis politik di Venezuela ini, penulis berusaha untuk mengungkap bagaimana delegitimasi Maduro bisa terjadi. Hugo Chavez sangat dicintai rakyat karena terkenal dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat yang berlandaskan Revolusi Bolivarian. Sama halnya dengan Nicolas Maduro, yang merupakan pengikut dari Hugo Chavez. Ia mendapatkan dukungan penuh dari rakyat untuk memimpin Venezuela. Namun lambat laun Maduro mengalami delegitimasi serius. Maka penulis akan mengungkapkan alasan pemerintahan Maduro mengalami delegitimasi tersebut. Kemudian penulis mengguankan dua teori yaitu teori *resource-curse* dan *crisis* sebagai berikut:

1.5.1. *Resource-Curse Theory* (Teori Kutukan Sumber Daya)

Teori *resource-curse* merupakan teori dari Richard Auty pada tahun 1993. Teori ini menyatakan bahwa banyaknya sumber daya mineral sering dikategorikan sebagai kutukan dari pada berkah untuk sebuah negara (Dele Ishakq & Joseph Ike Ogbanje, 2017). Teori kutukan ini biasanya berlaku pada negara berkembang yang memiliki sumber daya melimpah. Richard Auty menggambarkan sebuah kondisi suatu negara yang memiliki sumber daya melimpah namun tidak mampu untuk mengoptimalkan sumber daya alam maka akan kesulitan untuk memajukan ekonomi negara. Sehingga kemajuan ekonomi negara tersebut berada pada level yang lebih rendah dari pada negara yang tidak memiliki sumber daya dominan atau melimpah.

Teori ini diperluas oleh Sachs dan Warner (2001) bahwa sumber daya alam melimpah memiliki hubungan dengan perekonomian yang buruk (Dele Ishakq & Joseph Ike Ogbanje, 2017). Teori ini juga bisa disebut dengan *Paradox of plenty* yang artinya sebuah negara dengan sumber daya melimpah akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang cenderung lebih rendah dari pada negara yang memiliki sumber daya alam lebih sedikit. *Paradox of Plenty* memiliki alasan tersendiri. Bahwasanya hal ini bisa terjadi karena adanya kesalahan pemerintah pada pengelolaan sumber daya, pengelolaan tidak efektif oleh beberapa lembaga, adanya ketidakstabilan atau korupsi pada sebuah institusi yang memungkinkan adanya pengalihan pendapatan ril, dan adanya volatilitas pendapatan dari sumber daya alam karena perubahan pasar global.

Stiglitz dan Karl (2005) menambahkan bahwa pendapatan dari ekstraksi sumber daya nyatanya mampu menurunkan kekayaan negara kecuali jika pendapatan tersebut dialokasikan untuk diinvestasikan. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi adanya defisit dan korupsi. Jika pendapatan ini tidak diinvestasikan maka dikhawatirkan akan

menghasilkan sebuah pembangunan yang kolaps. Kondisi ini bisa dilihat pada negara-negara penghasil minyak seperti Venezuela. Bagaimana pemerintah mengelola dan manajemen sumber daya minyak dapat berpengaruh pada perekonomian Venezuela.

1.5.2. *Crisis Theory* (Teori Krisis)

Menurut Tomasz Grzegorz Grosse (2013) krisis adalah sebuah kondisi yang disebabkan adanya disfungsi di dalam sebuah sistem. Krisis juga bisa berasal dari akumulasi penyebab-penyebab krisis sebelumnya. Penyebab krisis bisa berasal dari internal maupun eksternal sebuah sistem.

Menurut Tomasz Grzegorz Grosse (2013) untuk mengetahui penyebab-penyebab krisis ada 4 elemen fundamental, yaitu masalah pembangunan, struktural, manajemen, dan legitimasi. Keempat elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masalah pembangunan (*Development problems*)

Dalam masalah pembangunan erat kaitannya dengan perekonomian. Gejala utama terjadi krisis ditandai dengan penurunan pertumbuhan GDP, peningkatan kemiskinan, menyusutnya produksi dan perdagangan termasuk dalam hubungan internasional (Grosse, 2013). Fenomena ini biasanya akan diikuti dengan menurunnya kesejahteraan sosial dan melebarnya kesenjangan. Dalam hubungan internasional penurunan stamina perekonomian bisa berimbas pada sebuah entitas politik dan merusak geopolitik sebuah negara. Jika berlangsung dalam jangka panjang akan memperparah disfungsi sebuah perekonomian negara yang selanjutnya mempengaruhi efisiensi pengambilan keputusan. Venezuela merupakan negara yang kaya akan cadangan minyak. Dalam memperoleh pendapatan negara, Venezuela sangat bergantung pada ekspor minyak. Tercatat 95 % pendapatan berasal dari ekspor minyak. Dalam konteks pembangunan, penulis berusaha untuk mengupas tuntas mengenai permasalahan terkait dengan pembangunan negara yang dapat menyebabkan krisis politik sebuah negara.

b. Masalah struktural (*Structural problems*)

Pada permasalahan struktural bisa muncul sektor internal maupun dari geopolitik suatu negara. Dalam masalah struktural bisa terkait juga dengan regulasi sebuah sistem. Contohnya adalah penurunan faktor-faktor produksi didalam sistem karena adanya kesalahan atau disfungsi faktor produksi atau pembangunan yang tidak tepat. Permasalahan struktural ini juga bisa berkaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan yang didasarkan dengan struktur landasan negara.

Permasalahan ekonomi dalam lini struktural ini mungkin saja sangat berpengaruh pada struktur geopolitik sebuah negara. Karena masalah struktural internal bisa saja akan berimbas pada penurunan daya saing dalam perdagangan atau hubungan dengan dunia internasional. Bahwasanya permasalahan ini jika tidak bisa segera diselesaikan maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada lingkup domestik berkepanjangan. Venezuela sebagai negara sosialis yang mengandalkan pendapatan minyak akan menjadi sorotan dalam pembahasan teori ini. Sehingga penulis bisa mengetahui dengan jelas bagaimana struktur ideologi dan ekonomi mampu mempengaruhi krisis di Venezuela.

c. Masalah manajemen (*Management problems*)

Pada dasarnya konsep manajemen ini merupakan salah satu upaya seorang aktor untuk mengatasi sumber permasalahan dan bukan hanya upaya untuk mengatasi gejala-gejala yang ada. Tujuannya adalah untuk memulihkan berbagai permasalahan seperti pembangunan dan struktural (Grosse, 2013). Krisis manajemen ini bisa diartikan juga dengan melemahnya kekuasaan atas kebijakan internal yang dibuat. Bisa jadi masalah manajemen datang dari pembuatan kebijakan politik maupun ekonomi yang tidak tepat. Sehingga mampu memberikan implementasi yang tidak sesuai dengan upaya penyelesaian masalah. Faktor lainnya adalah adanya persaingan antara aktor-aktor politik untuk memenuhi kepentingan mereka masing-masing. Proporsi berlebihan dari sifat ini akan mengganggu kestabilan seluruh sistem dalam jangka panjang, meskipun

mereka dapat membawa manfaat jangka pendek bagi entitas dominan atau kelompok sosial istimewa. Contohnya, akan muncul hambatan dalam penggunaan instrumen anti-krisis sehingga yang tercipta hanyalah solusi jangka pendek. Solusi yang tidak strategis seperti ini akan memberikan efek samping yang lebih tinggi pada disfungsi sistem. Hal yang memungkinkan terjadi adalah adanya kekuatan eksternal yang menjadikan permasalahan internal tersebut menjadi intensinya. Dalam konteks penelitian ini dapat dideskripsikan misalnya seperti gejolak penentangan atau protes dari sebagian rakyat Venezuela terhadap kebijakan Maduro. Namun, benarkah semata-mata permasalahan ini terkait dengan mismanajemen kebijakan yang dibuat oleh Maduro ? inilah yang hendak peneliti gali lebih mendalam untuk mendapatkan sebuah jawaban yang tepat.

d. Masalah legitimasi (*Legitimization problems*)

Ketika terjadi krisis maka akan muncul respon berupa ketidakpuasan terhadap pemerintah. Sering kali krisis dapat mempengaruhi sebuah sistem. Contohnya dalam sistem kekuasaan yang menganut asas demokrasi mengalami defisit demokrasi. Adanya fakta fenomena politik dan ekonomi telah menjadi dasar terjadinya perubahan terhadap sebuah ideologi sebuah sistem (Grosse, 2013).

Legitimasi merupakan sebuah cerminan dari konsep kekuasaan (Beetham, 1991, p. 3). Dikatakan bahwa pemimpin yang tidak mempunyai sebuah legitimasi tidak akan bisa membuat rakyat patuh secara suka rela. Dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan mereka harus memberikan sebuah tekanan kepada masyarakat. Tekanan tersebut terkadang diiringi dengan pemberian sanksi agar kebijakan yang diberlakukan tidak diabaikan (O'Neil, 2010: 35). Dalam jangka panjang ketiadaan legitimasi bisa membuat sebuah konstitusi memudar dan diabaikan. Mengapa hal ini bisa terjadi ? Menurut David Beetham⁶ (1991)

⁶ David Beetham merupakan ahli teori sosial dan terfokus pada kajian HAM serta demokrasi.

hal ini dikarenakan masyarakat sebagai manusia yang harus bisa bertahan hidup maka mereka harus menjadi lebih rasional. Dalam artian lain masyarakat bisa disebut sebagai agen yang rasional. Pada negara demokrasi, rakyat bebas memilih tujuan hidupnya. Tanpa legitimasi sebuah kepemimpinan tidak akan berdasarkan konstitusi. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat, maka rakyat bebas memilih untuk tidak mematuhi. Namun dengan adanya legitimasi, maka rakyat akan mematuhi sebuah aturan atau kebijakan dengan suka rela tanpa paksaan. Meskipun aturan atau kebijakan tersebut termasuk *irrational* untuk mereka (Beetham, 2009).

Legitimasi mampu memberikan insentif berupa moral kepada masyarakat untuk mematuhi otoritas, kepatuhan terhadap ketertiban, stabilitas dan efektifitas (Beetham, 1991, hlm 34). Dengan adanya beberapa aspek tersebut maka pemerintah akan dimudahkan dalam pembuatan aturan atau kebijakan atas nama rakyat. Dengan hasil akhir berupa persetujuan bukan paksaan.

Menurut David Beetham (1991) terdapat tiga jenis kriteria legitimasi, yaitu, *conformity with established rules*, *justifiability of rules in terms of shared beliefs*, dan *legitimation through expressed consent* sebagai berikut :

1. *Conformity with established rules*

Pola ini merupakan dasar dari pembuatan sebuah keputusan, aturan dan kebijakan. Beberapa dasar yang dimaksud adalah konstitusi, hukum, dan kode etik. Selain itu legitimasi akan didapatkan jika sesuai rezim yang berlaku. Contohnya Maduro akan mendapatkan legitimasi jika memenangkan kekuasaan melalui pemilu karena Venezuela merupakan negara yang demokratis. Di lain sisi dalam kepemimpinannya, Maduro menggunakan kebijakan yang bersifat *ad hoc* seperti penangkapan pihak oposisi dan menggunakan kekerasan dalam

pembubaran demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa. Maka kemudian legitimasinya akan dipertanyakan

2. *Justifiability of rules in terms of shared beliefs*

Tingkatan kedua ini adalah sebuah kebijakan harus berdasarkan kepentingan rakyat bukan elit. Sebelum membuat kebijakan maka pemerintah harus mengerti apa keinginan masyarakat (*input*) yang kemudian siap diolah menjadi kebijakan pro rakyat (*output*). Rakyat Venezuela sangat mendambakan kedamaian dan kesejahteraan sedangkan Maduro tidak dapat memenuhinya.

Selain itu O'Neil (2010: 36) berpendapat bahwa keyakinan bersama ini bisa didapatkan dari jenis tradisional Weber. Bahwa sistem yang melekat lama pada sebuah negara maka akan semakin susah untuk digantikan oleh sistem yang baru. Karena sistem pertama telah membangun kepercayaan dari rakyat.

3. *Legitimation through expressed consent*

Pada tingkatan terakhir ini sebuah legitimasi bisa di dapat jika mendapatkan sebuah pengakuan dari pihak yang memiliki pengaruh kuat. Pengakuan ini bisa didapatkan dalam lingkup domestik dan internasional. Beberapa negara besar seperti AS dan EU menolak mengakui Maduro mendapatkan dukungan militer dari pihak domestik. Namun Venezuela tidak mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Hal ini dibuktikan dengan AS dan EU mengangkat Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela secara sepihak.

1.6. Argumen Utama

Krisis politik di Venezuela terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor. Penulis berargumen bahwa adanya sebuah *paradox of plenty* yang artinya krisis ini diawali dengan adanya kesalahan manajemen sumber daya

minyak Venezuela yang mengakibatkan adanya resesi ekonomi. Resesi inilah yang membuat pemerintah tidak bisa melanjutkan misi sosialis yang menyebabkan adanya masalah pembangunan. Upaya pemerintah yang tidak tepat sasaran menyebabkan permasalahan struktural seperti mengikisnya demokrasi dan dasar sosialis negara. Sebagai akibat dari ketidakmampuan pemerintah ini maka terjadi sebuah *distrust* yang berakhir dengan delegitimasi pemerintahan Maduro. Dalam mempertahankan kekuasaannya maka Maduro melakukan tindakan represif yang berujung pada tuntutan dari rakyat, oposisi dan dunia internasional agar Maduro meninggalkan jabatannya. Selain itu kebijakan-kebijakan Maduro untuk mengebiri oposisi menjadi alasan kuat adanya perlawanan dari oposisi yang di dukung oleh rakyat.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah aspek yang dapat membantu penulis agar tercipta sebuah karya ilmiah yang terstruktur. Oleh sebab itu penulis membagi metode penelitian ini dengan beberapa aspek yang peneliti anggap penting untuk penyusunan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1.7.1. Pendekatan Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah langkah untuk menyusun dan merangkai prosedur penelitian (Creswell, 2014). Hal ini ditujukan untuk mendapatkan sebuah metode pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Dalam membuat keputusan dalam penelitian, peneliti harus memiliki fokus pendekatan mana yang akan digunakan untuk menganalisis sebuah topik.

Dalam sebuah penelitian ada 3 pendekatan yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Pada penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2014) bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terfokus pada masalah sosial atau manusia [...] Data yang biasanya dikumpulkan dalam isi berupa analisis data secara induktif dengan membangun tema mulai dari yang khusus hingga umum, peneliti membuat interpretasi tentang makna data dan pentingnya menggambarkan kompleksitas suatu situasi. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel.”

Metode kualitatif menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk penyelidikan ilmiah daripada metode penelitian kuantitatif. Meskipun prosesnya serupa, metode kualitatif bergantung pada teks dan data gambar, memiliki langkah unik dalam analisis data, dan menggambar pada desain yang beragam. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan daftar jenis sumber data yang terus berkembang, menggunakan langkah teliti untuk merekam data, menganalisis informasi melalui beberapa langkah analisis, dan menyebutkan pendekatan untuk mendokumentasikan akurasi dan validitas data yang dikumpulkan.

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan tinjauan literatur diperlukan sebuah teknik dalam menemukan dan merangkum sebuah literatur. Creswell (2014) menyatakan ada beberapa teknik yang bisa dilakukan seperti:

1. Identifikasi kata kunci. Langkah ini berguna untuk menemukan materi di perpustakaan Universitas.
2. Menggunakan kata kunci untuk pencarian pada media internet bisa berupa jurnal, buku, dan sumber berita yang sesuai dengan tema.
3. Mencari beberapa laporan penelitian dalam sebuah artikel atau buku sesuai dengan tema.
4. Membaca dan memahami bab awal untuk mengetahui korelevansi buku atau artikel tersebut.
5. Ketika sudah menemukan yang relevan, maka peneliti harus memulai menyusun atau merancang literatur.

6. Setelah menyusun peta literatur maka peneliti harus menyusun ringkasan literatur mana yang paling penting. Kemudian dalam penulisan tinjauan literatur harus menggunakan standar panduan yang digunakan.
7. Langkah terakhir adalah menggabungkan literatur sesuai dengan kehendak penelitian sehingga tercipta sebuah tulisan yang terorganisir dengan baik.

1.7.3. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti berhasil mengidentifikasi topik adalah mengenai pengumpulan literatur atau pengumpulan data sekunder. Menurut Creswell (2014) adalah sangat penting dalam menggunakan literatur untuk merencanakan sebuah metode studi kualitatif sebagai berikut:

1. Menggunakan literatur dengan hemat di awal. Hal ini bertujuan untuk penyampaian secara induktif kecuali memang membutuhkan literatur substantif di awal.
2. Pertimbangkan tempat yang paling tepat untuk literatur dalam studi kualitatif. Penggunaan literatur di awal digunakan untuk membingkai sebuah masalah dan mayoritas digunakan diakhir untuk objek analisis.
3. Pertimbangkan jenis tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk membangun korelasi antara topik atau identifikasi masalah utama.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang perpolitikan dan ekonomi di Venezuela sebagai pengantar. Hal ini ditujukan untuk mengetahui urgensi penulisan. Kemudian penulis menyusun beberapa subbab seperti latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan

penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Venezuela Pada Masa Pemerintahan Hugo Chavez

Bab ini berisi tentang gambaran umum seperti kondisi geografis, sejarah singkat dalam bidang ekonomi, sosial, dan khususnya perpolitikan sebelum kepemimpinan Nicolas Maduro.

Bab 3 Krisis Politik di Venezuela Era Nicolas Maduro

Bab ketiga ini penulis akan menjabarkan mengenai bagaimana gambaran kepemimpinan Maduro. Seperti dalam hal kebijakan ekonomi maupun politik yang dibuat selama masa kepemimpinan Maduro.

Bab 4 Analisis Faktor-faktor Penyebab Krisis Politik Venezuela

Selanjutnya pada bab ini penulis akan memulai analisis faktor penyebab krisis politik Venezuela dengan menggunakan teori *resource-curse* dan *crisis*.

Bab 5 Kesimpulan

Pada bab terakhir penulis akan menuliskan inti jawaban dari permasalahan yang penulis angkat.

BAB 2

VENEZUELA PADA MASA PEMERINTAHAN HUGO CHAVEZ

2.1. Venezuela Pra Pemerintahan Hugo Chavez

Venezuela merupakan salah satu negara di Amerika Selatan. Venezuela merupakan salah satu negara bekas jajahan Spanyol. Kemunculan Simon Bolivar⁷ dan Fransisco de Miranda⁸ membawa angin baru terhadap Venezuela. Simon Bolivar mencoba untuk memperbaiki kondisi Venezuela pasca kolonialisme Spanyol. Dalam Manifesto Cartagena tahun 1812, Simon Bolivar menyampaikan kepada publik mengenai fakta-fakta apa saja yang menyebabkan terjadinya bencana di Venezuela. Bolivar berupaya untuk menjadikan Venezuela menjadi negara republik. Oleh sebab itu Manifesto Cartagena menjadi bukti yang paling meyakinkan mengenai anti federalisme. Bolivar sangat percaya bahwa sistem republik menjadi lemah jika terpengaruh oleh sistem federal.

Tahun 1830-1848 Venezuela dipimpin oleh Jose Antonio Paez⁹ yang mengantarkan Venezuela menjadi negara oligarki konservatif. Kepemimpinan Paez menjadi sangat kontroversial. Banyak masyarakat beranggapan bahwa ia telah mengkhianati Bolivar karena telah merubah negara menjadi oligarki. Presiden Juan Vicente Gomez menjadi presiden dari tahun 1908-1935.¹⁰ Gomez menjadi presiden dari tahun 1908-1935. Ia memiliki kekuatan absolut secara *de facto* dan menjadi panglima perang. Namun pada masa pemerintahannya, masyarakat Venezuela mengalami penindasan dan penyiksaan. Disamping itu terdapat ekspansi ekonomi

⁷ Simon Bolivar (24 Juli 1783 - 17 Desember 1830) merupakan *Venezuela's Great Libertador* (pembebas Venezuela).

⁸ Fransisco de Miranda (28 Maret 1750 - 14 Juli 1816) adalah seorang pemimpin militer dan revolusioner Venezuela

⁹ Jose Antonio Paez pahlawan kemerdekaan Venezuela. Dia adalah Jenderal, Kepala Tentara Nasional dan Kepala Militer Departemen Venezuela. Pada tahun 1826, ia memimpin gerakan separatis yang dikenal sebagai La Cosiata, yang memisahkan Venezuela dari Gran Colombia

¹⁰ Juan Vicente Gomez (24 Juli 1857 - 17 Desember 1935) adalah seorang jenderal militer dan penguasa *de facto* Venezuela dari tahun 1908 hingga kematiannya pada tahun 1935.

besar-besaran di Venezuela. Ekspor kopi melonjak, serta tahun 1918 eksploitasi minyak menjadi pendapatan besar untuk Venezuela. Penghasilan minyak ini juga ikut andil dalam menyokong pemerintahan Gomez karena diketahui bahwa beberapa industri perminyakan dimiliki oleh Gomez sehingga disebut dengan “*Petroleum dictatorship*”. Disamping keberhasilannya menghasilkan banyak pundi-pundi uang, Gomez tetap menerima banyak demo sebagai akibat dari kediktatorannya. Berbondong-bondong gerakan mahasiswa melakukan aksi penolakan. Gomez tidak segan untuk mengutus pasukannya untuk membunuh bahkan memenjarakan mereka hingga tewas.

Pada tahun 1935 Venezuela mencoba untuk menuju abad modern untuk menghapuskan kediktatoran dan memilih manakan proses politik yang tepat untuk Venezuela. Setiap masa kepemimpinan mencerminkan modernisasi dengan caranya masing-masing. Contohnya pada setiap masa memunculkan partai rakyat dengan ideologi yang berbeda-beda seperti, AD, PCV, dan COPEI.

Venezuela juga mengalami sebuah masa transisi dari kediktatoran menjadi demokratis. Adanya sebuah kekuatan politik yang mulai ditransfer kepada rakyat setelah kematian Gomez. Tahun 1947 Ramulo Gallegos terpilih menjadi presiden pertama yang benar-benar mengadakan pemilu yang langsung dan rahasia. AD juga berhasil memenangi mayoritas kursi dalam pemilihan kongres. Pada 15 Februari 1948, Romulo Gallegos dilantik sebagai presiden. Pemerintahannya melakukan upaya baru pada reformasi agraria, seperti langkah-langkah untuk mengurangi pengaruh militer. Namun sayangnya militer melakukan kudeta pada Gallegos pada saat proses politik tersebut. Tahun 1952 Perez Jimenez dan Villalba mencalonkan diri dalam *Frente Electoral Independiente Tiket* (pemilihan independen). AD dan *Partido Comunista de Venezuela* dilarang berpartisipasi, karena memang pada masa Delgado dua partai ini merupakan partai yang dilarang oleh pemerintah. Pemilu berjalan dengan tertib dan diketahui hasil awal menunjukkan Villalba memimpin dengan

selisih besar. Namun pada tanggal 2 Desember 1952 Perez mengumumkan bahwa partai politik FEI yang berada di bawah kekuasaan Jimenez mengalahkan URD dan COPEI. Pada pemerintahan Jimenez mengadopsi konstitusi baru, yang antara hal-hal lain, membuat jabatan gubernur ditunjuk dan disahkan oleh presiden untuk mengambil tindakan apa pun yang dianggap perlu untuk pelestarian keamanan bangsa, perlindungan perdamaian sosial, dan pemeliharaan ketertiban umum. Konstitusi, diundangkan pada bulan April 1953 juga mengembalikan prosedur dimana presiden dipilih oleh legislatif. Menurut sebagian besar akun, ribuan dari masyarakat Venezuela disiksa dan dibunuh selama pemerintahannya (Tarver dan Frederick, 2005). Pada pertengahan Januari 1958, para siswa mulai kerusuhan yang sangat populer di Caracas. Gereja, pers, dan politisi bersatu dengan angkatan udara dan angkatan laut untuk menggulingkan Perez Jimenez. Pemberontakan menyebabkan berakhirnya rezim 10 tahun Perez Jimenez.

Presiden Venezuela Romulo Betancourt membawa demokrasi kembali ke Venezuela dengan melembagakan rencana penghematan administrasi. Pertama mengatasi masalah ekonomi yang telah diwariskan. Dia berhasil bertahan meskipun terdapat dua perpecahan di dalam partainya yang menjadi masalah sosial dan politik bagi pemerintahannya. Namun, ia mampu menyelesaikan masa jabatan konstitusionalnya dan membentuk pemilihan umum pada tahun 1963. Keberhasilan dan hasil pemilu 1963 jelas menunjukkan bahwa Rakyat Venezuela menginginkan demokrasi. Hasil pemilu tahun 1963 membuat AD mendapatkan posisi utama, COPEI yang demokratis menjadi partai terbesar kedua, dan URD berada di peringkat ketiga (Tarver dan Frederick, 2005).

Memasuki tahun 1974 pemilu di Venezuela semakin pluralistik. Tercatat ada 12 kandidat calon presiden. Masing-masing memiliki ideologinya masing-masing. Mayoritas dari mereka mulai bergeser dari

kiri ke kanan. Pemilu ini dimenangkan oleh Carlos Andres Perez¹¹. Perez berusaha untuk melakukan banyak nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Ia berusaha untuk mendapatkan sebuah kemandirian ekonomi Venezuela. Pertama ia menasionalisasi sektor industri besi dan membatalkan konsesi kepada anak perusahaan *United States Steel Corporation* yang dimiliki oleh AS dan *Bethlehem Steel*. Perez terus meningkatkan produksi minyak bumi, besi, dan baja. Ia juga melakukan pengembangan dalam sektor agraria. Pemilu berikutnya pada tahun 1989 dimenangkan oleh Carlos Andres Perez. Dengan begitu maka Perez menjabat menjadi presiden untuk kedua kalinya. Namun ada perbedaan signifikan pada pemerintahan pertama dan kedua Perez. Pada kepemimpinan keduanya ia dihadapkan dengan krisis ekonomi. Puncaknya ketika ia bekerjasama dengan IMF. Ia beralasan dana ini akan digunakan untuk memajukan perekonomian. Namun nyatanya perekonomian yang tidak stabil membuat korupsi besar-besaran. Perez menerapkan sistem ekonomi neo-liberal untuk Venezuela. Hasilnya adalah sektor-sektor yang dikuasai negara diserahkan kepada swasta dan berakhir dengan kenaikan harga yang tidak terkendali. Tercatat bahwa perusahaan asing dibebaskan membawa 100 % keuntungan mereka ke negara asalnya, serta pengangguran yang meningkat mencapai 14 %, inflasi mencapai 80,7 % dan lebih dari 80 % masyarakat Venezuela berada pada garis kemiskinan (Thea, 2010). Selain itu perbedaan dengan kepemimpinannya yang pertama yaitu pada kepemimpinan tahun 1974 ia dicintai oleh rakyat Venezuela berkat keberhasilannya dalam sektor ekonomi. Namun pada kepemimpinan yang kedua, ia mengalami banyak pemberontakan karena sifatnya yang otoriter. Ia harus melunasi hutang luar negeri disamping itu

¹¹ Carlos Andres Perez (27 Oktober 1922-25 Desember 2010) ia juga dikenal dengan singkatan CAP atau nama julukannya El Gocho. Ia adalah seorang politikus dan Presiden Venezuela untuk dua periode, 1974-1979 dan 1989-1993. Periode pertama masa jabatan kepresidenannya dikenal dengan sebutan “Saudi Venezuela” karena kesejahteraan ekonomi dan sosial yang terjadi berkat pendapatan luar biasa dari ekspor minyak bumi. Namun periode kedua kepresidenannya ditandai dengan berlanjutnya krisis ekonomi tahun 1980-an, dan serangkaian krisis sosial, pemberontakan umum.

harga minyak dunia sedang mengalami penurunan drastis. Akibatnya Perez memberikan kebijakan yang berat kepada rakyat Venezuela seperti menaikkan harga listrik dan layanan publik seperti telepon dan sanitasi. Kebijakan ini sangat berimbas pada rakyat miskin sehingga terjadi ledakan sosial yang menewaskan lebih dari 300 orang di tangan pasukan dan polisi (Tarver dan Frederick, 2005). Selain itu fenomena pemberontakan juga terjadi di kalangan siswa, guru yang melakukan pemogokan kerja dan buruh. Sehingga pada masa pemerintahan Perez kedua, demokrasi yang telah dikendalikan oleh AD dan COPEI hampir tidak tampak lagi di permukaan. Hal ini merupakan awal dari kejatuhan Perez dan menjadi awal mula kebangkitan Hugo Chavez Frias.

2.2. Kebangkitan Hugo Chavez

Hugo Rafael Chávez Frías lahir pada 28 Juli 1954, di wilayah llanos. Ayahnya adalah guru sekolah dasar yang tinggal di kota kecil Sabareta di negara bagian Barinas. Ayah Hugo Chavez menjadi gubernur negara bagian Barinas pada tahun 1998 (Levin, 2007: 46-47).

Ketika Hugo yang berusia 17 tahun memutuskan untuk menghadiri Venezuela Akademi Ilmu Militer di Caracas. Ia lulus pada tahun 1975 dengan gelar seni dan ilmu militer. Setelah itu justru ia mulai berpikir tentang perlunya militer untuk memiliki peran dalam menjalankan negara. Setelah lulus, tahun 1976 Chavez ditugaskan dan dikirim ke Cumaná untuk menghentikan pemberontakan. Di sana, dia menemukan dirinya terkejut dan jijik dengan perlakuan para pejuang gerilya. Chavez melihat banyaknya tahanan dipukuli. Pada umur dua puluh tiga tahun, dia mengorganisir Tentara Pembebasan Rakyat Venezuela. Pada 1977, Hugo Chavez menikahi Nancy Colmenares, seorang wanita yang berasal dari kampung halamannya di Sabareta. Setelah menikah, Nancy tetap tinggal di Sabareta sementara Chavez bertugas di militer.

Tahun 1980 ia kembali ke akademi militer di Caracas. Chavez menjadi instruktur olahraga dan guru sejarah militer dan politik di sana.

Pada bulan Desember 1982, Chavez secara tak terduga diperintahkan untuk berpidato kepada 1.200 perwira dan pasukan. Chavez akhirnya berpidato tentang bagaimana Amerika Latin berada pada sejarah penindasan. Bahkan saat sudah merdeka pun masih banyak orang-orang yang tertindas. Pada tahun 1983, Chavez dan para kolaborator membentuk kelompok politik atau cikal bakal partai politik yang disebut MBR-200¹² (Gonzalez, 2014: 33).

Pada 1991 merencanakan kudeta, dengan nama sandi Plan Zamora. Pada November 1992, ada upaya kudeta. Namun upaya kudeta ini mengalami kegagalan karena adanya kesalahan komunikasi. Akhirnya Chavez di tahan dengan tuduhan percobaan kudeta pada pemerintahan Perez. Tahun 1994 Chavez dibebaskan oleh presiden Venezuela. Setelah dibebaskan, Chavez mulai mengatur ulang hidupnya secara politis maupun kehidupan pribadi. Dia menceraikan istrinya, Nancy dan ia juga membangkitkan kembali MBR-200 menjadi MVR¹³.

Menjelang akhir 1996, saat berkampanye untuk jabatan, Chavez bertemu istri keduanya, jurnalis Marisabel Rodríguez. Mereka menikah pada Desember 1997. Di samping itu Chavez terus melakukan perjalanan kampanye dengan gigih. Kampanye Chávez memiliki tiga poin utama (Levin, 2007: 79):

1. Membuat kesepakatan antara Partai COPEI dan AD untuk memastikan bahwa hanya kandidat mereka yang berhak atas kepresidenan Venezuela.
2. Akhir dari korupsi politik.
3. Akhir dari kemiskinan di Venezuela.

Pemilu Venezuela diadakan pada tanggal 6 Desember 1998. Pemilu diikuti oleh dua kandidat yaitu Henrique Salas Romer dan Hugo Chavez.

¹² MBR-200 merupakan gerakan politik dan sosial yang didirikan oleh mantan presiden Venezuela Hugo Chávez pada tahun 1982. Akhirnya merencanakan dan melaksanakan percobaan kudeta pada tanggal 4 Februari 1992.

¹³ MVR adalah partai politik sosialis demokratis di Venezuela yang didirikan pada Juli 1997 yang ditujukan untuk merubah MBR-200. Selain itu MVR mendukung pencalonan Hugo Chavez dalam pemilihan presiden 1998.

Setelah penghitungan suara selesai, ternyata Chavez berhasil memenangkan pemilu dari 54 % suara dan Salas hanya menerima 39 % (Levin, 2007: 80). Presiden Hugo Rafael Chavez Frías resmi menjabat pada 2 Februari 1999.

2.2.1. Kondisi Politik

Setelah resmi menjabat, Chavez langsung berkeinginan untuk mewujudkan visi-misinya pada masa kampanye. Ia mengatakan bahwa militer tidak seharusnya selalu berhubungan dengan senjata. Chavez menghimbau kepada militer Venezuela untuk membantu mengentas kemiskinan rakyat. Selain itu dengan melihat kondisi Venezuela yang sedang dilanda resesi ekonomi kala itu karena harga minyak turun, ia berusaha untuk mengembalikan kondisi perekonomian Venezuela. Chavez menjanjikan konstitusi baru, untuk menggantikan konstitusi tahun 1961. Untuk mencapai hal-hal ini, Chavez menyerukan dua suara nasional. Yang pertama ia meminta rakyat menyetujui untuk pembentukan Majelis Konstitusi Nasional yang bertugas untuk menulis ulang konstitusi baru. Kedua, Chavez perlu memilih anggota majelis tersebut. Referendum pun dilakukan dan suara pada referendum untuk menulis ulang konstitusi sangat besar yaitu sekitar 71,78 % (Levin, 2007: 83). Partai Chavez, MVR, dan sekutunya kemudian menerima suara yang cukup besar dan mereka memenangkan 120 kursi dari total 131 kursi di Majelis Konstitusi. Lantas kemudian sebagai langkah pertama, Majelis memasang saluran telepon bebas pulsa dengan tujuan seluruh rakyat Venezuela bisa ikut memberikan pendapat dan memudahkan anggota majelis mengorganisi majelis regional untuk membahas konstitusi baru.

Pada Agustus 1999, Chavez menciptakan pengadilan komite darurat dapat menghapus delapan hakim dari Mahkamah Agung dengan alasan korupsi. Dalam konstitusi baru, nama negara itu diubah menjadi Republik Bolivarian Venezuela. Masa jabatan presiden dari lima tahun diperpanjang hingga enam tahun dan diizinkan untuk seorang presiden menjabat dua

periode berturut-turut. Konstitusi juga mengubah NA dari bikameral menjadi unikameral. Konstitusi baru juga melarang privatisasi perusahaan minyak yang dimiliki oleh negara dan tunjangan tenaga kerja dan jaminan sosial yang diperpanjang (Levin, 2007: 84).

Chavez adalah orang yang mencetuskan Revolusi Bolivarian. Basis gerakan Chavez pada awal kampanyenya adalah sebagai berikut:

1. Venezuela akan memiliki kedaulatan penuh dan tidak menyerah pada kekuatan imperialistik internasional.
2. Pemungutan suara dan referendum adalah untuk partisipasi rakyat Venezuela
3. Swasembada ekonomi. Dia menginginkan makanan dan barang-barang konsumsi Venezuela akan lebih banyak diproduksi di dalam negeri.
4. Bahwa akan ada dukungan untuk layanan patriotik.
5. Distribusi pendapatan minyak Venezuela yang adil dan merata.
6. Penghapusan korupsi.
7. Penghapusan *puntofijismo*, sistem dua partai yang mengecualikan anggota dari pihak lain dari kepresidenan.

Tahun 2002 Chavez mendapatkan dorongan untuk meninggalkan jabatannya oleh pihak oposisi. Namun percobaan kudeta oleh Pedro Carmona Estanga yang merupakan oposisi hanya berhasil selama dua hari saja. Adanya dukungan besar dari rakyat membuat Chavez berhasil kembali duduk di jabatannya.

Setelah enam tahun memimpin, tahun 2006 Venezuela mengadakan pemilu presiden. Pemilihan presiden 3 Desember 2006 di Venezuela diikuti oleh dua kandidat yaitu Manuel Rosales dan Hugo Chavez. Hasil pemungutan suara menyatakan bahwa Chavez berhasil memenangkan pemilu dengan perolehan suara 62,87% dan Rosales dengan 36,88% (Sullivan, 2009)

Setelah tahun pemilu presiden 2006, tahun 2007 Chavez mengumumkan bahwa ia akan memperkuat kekuasaannya dengan

membawa Venezuela menuju visi “*21st century socialism*”. Ia mengutus Majelis Nasional untuk menyetujui undang-undang baru yang memungkinkannya untuk mengeluarkan undang-undang dengan. Tanggal 31 Januari, Majelis menyetujui untuk memberikan kekuasaan hukum luas kepada Chavez dalam jangka waktu 18 bulan. Ada beberapa kekhawatiran dari beberapa pihak seperti kritikus khawatir bahwa langkah itu akan merusak demokrasi. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan ini bisa membawa Venezuela menuju perubahan yang lebih cepat. Chavez bertekad untuk menjadikan Venezuela negara sosialis baru. Beberapa rancangan yang ia buat adalah menghilangkan otonomi bank sentral, menjadikan PdVSA pemegang saham mayoritas dari minyak Orinoco Belt, mengubah konstitusi untuk memungkinkan presiden dipilih kembali, untuk meluncurkan kebijakan baru yaitu “*bolivarian popular education*” yang nantinya akan ditujukan untuk memperdalam nilai-nilai sosial baru Venezuela, membuat federasi dewan, dan untuk menasionalisasi telekomunikasi terbesar di negara itu perusahaan (CANTV), dan perusahaan listrik, termasuk *Electricidad de Caracas* (Sullivan, 2009).

Pada Agustus 2007, Chavez mengumumkan usulannya untuk melakukan reformasi konstitusi yang akan mengubah 33 dari 350 pasal konstitusi Venezuela 1999, dan bahwa dia mengklaim akan menggerakkan Venezuela menuju model pembangunan baru yang dikenal sebagai “*socialism in the 21st century*”. Tujuannya adalah merangkul demokrasi partisipatif dan ekonomi campuran. Menurut Pemerintah Venezuela, tujuan reformasi adalah untuk mempercepat redistribusi sumber daya minyak Venezuela untuk memberi manfaat kepada orang miskin; desentralisasi kekuatan politik memberikan keleluasaan partisipasi masyarakat dan menguraikan model landasan hukum pembangunan demokrasi baru yang lebih adil.

NA menyelesaikan reformasi ini tanggal 2 November 2007 dengan mengubah 36 artikel tambahan untuk total 69 amandemen konstitusi.

Amandemen disahkan pada tanggal 2 Desember 2007 dengan dibagi menjadi dua bagian yaitu Blok "A" dan Blok "B". Blok "A" terdiri dari 46 artikel amandemen konstitusi, termasuk 33 reformasi yang diusulkan oleh Chavez dan 13 diusulkan oleh NA. Blok "B" terdiri dari amandemen terhadap 23 artikel yang diusulkan NA.

Beberapa isi dari Referendum Konstitusi Blok A sebagai berikut (Sullivan, 2009):

1. Menurunkan usia pemilih dari usia 18 hingga 16 tahun (Pasal 64);
2. Melarang pendanaan asing dari asosiasi dengan tujuan politik, dan menyediakan pembiayaan pemerintah untuk kegiatan pemilihan (Pasal 67);
3. Mengurangi minggu kerja dari 44 menjadi 36 jam dan hari kerja dari 8 jam menjadi 6 jam (Pasal 90);
4. Mengakui keragaman multi-budaya Venezuela dan pentingnya keanekaragaman budaya asli, Eropa, dan Afrika (Pasal 100);
5. Pemerintah mengembangkan bentuk bisnis dan unit ekonomi yang berbeda dari kekayaan sosial dan produksi atau distribusi sosial untuk menciptakan kondisi terbaik ekonomi sosialis (Pasal 112);
6. Selain properti pribadi, untuk menambahkan beberapa klasifikasi baru untuk properti publik, sosial, kolektif, dan campuran (Pasal 115);
7. Menghapus batas masa jabatan dua presiden, dan memperpanjang masa jabatan presiden dari enam hingga tujuh tahun (Pasal 230);
8. Menyatakan bahwa sistem sosial ekonomi Venezuela didasarkan pada sosialis dan prinsip-prinsip anti-imperialis, antara lain (Pasal 299); dan
9. Menghilangkan independensi Bank Sentral, yang akan termasuk menempatkan cadangan internasional di bawah administrasi dan arahan Presiden (Pasal 318).

Beberapa isi dari Referendum Konstitusi Blok A sebagai berikut (Sullivan, 2009):

1. Melarang diskriminasi berdasarkan kesehatan dan orientasi seksual (Pasal 21);
2. Memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk menanggukkan hak konstitusional tertentu (Pasal 337);
3. Meningkatkan persentase tanda tangan yang diperlukan bagi warga negara untuk memulai amandemen konstitusi dari 15% menjadi 20% dari yang ada dalam daftar pemilih (Pasal 341).

Namun tanggal 3 Desember 2007 CNE menyatakan bahwa kedua blok ini mengalami kegagalan dan tidak disetujui oleh rakyat. Perbedaan margin sangat tipis yaitu Blok A dikalahkan dengan selisih suara 1,41 % dan Blok B dikalahkan dengan selisih suara by 2.11%.

Tahun 2008 Chavez mengumumkan bahwa ia akan bergerak maju dengan rencana untuk menghapus batas dua masa jabatan presiden. Akhirnya, setelah dipungut suara untuk perubahan masa jabatan ini, ternyata tingkat partisipasi mencapai 70%. Sehingga reformasi konstitusi disetujui pada 15 Februari dengan 55% menyetujui dan 45% memilih untuk menolak (Sullivan, 2009). Pemilu presiden di Venezuela dilaksanakan kembali pada bulan Oktober 2012. Pemilu diikuti oleh Henrique Capriles dan Hugo Chavez. Pada pemilu ini Chavez berhasil memenangkan suara rakyat. Namun bulan Maret 2013 Chavez meninggal dunia dan digantikan oleh Nicolas Maduro.

2.2.2. Kondisi Ekonomi

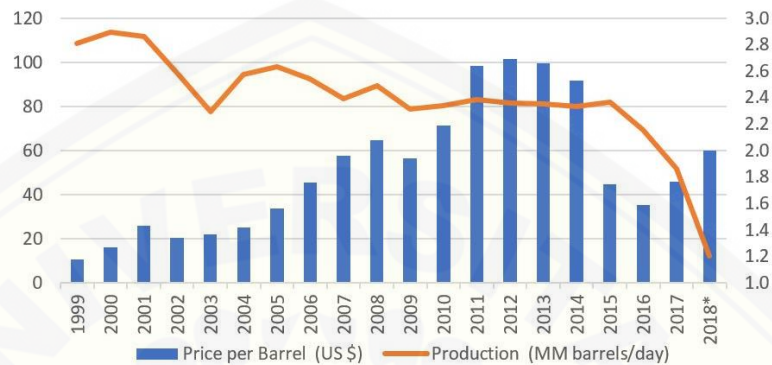
Dalam pemerintahannya, Chavez bukan hanya banyak merubah dasar-dasar perpolitikan di Venezuela. Beberapa perubahan dalam bidang ekonomi juga sangat disesuaikan dengan Revolusi Bolivarian demi menciptakan kesejahteraan rakyat. Pada awal masa jabatannya menjadi presiden, Venezuela mendapatkan warisan permasalahan ekonomi yang serius dari pendahulunya. Pasalnya kemiskinan di Venezuela menginjak

angka 70 % atau setara dengan 26 juta jiwa (Afeb, 2012: 90). Oleh sebab itu Chavez melakukan beberapa perubahan mendasar terutama pada konstitusi 1961 menjadi Konstitusi 1999. Pada Konstitusi Republik Bolivarian pasal 299 menyebutkan bagainya rezim ekonomi yang berlaku di Venezuela sebagai berikut:

“The economic regime of the Bolivarian Republic of Venezuela is based on the principles of social justice, democratization, efficiency, free competition, protection of the environment, productivity and solidarity, with a view to ensuring overall human development and a dignified and useful existence for the community. The State, jointly with private initiative, shall promote the harmonious development of the national economy, to the end of generating sources of employment, a high rate of domestic added value, raising the standard of living of the population and strengthen the economical sovereignty of the country, guaranteeing the reliability of the law; the solid, dynamic, sustainable, continuing and equitable growth of the economy to ensure a just distribution of wealth through participatory democratic strategic planning with open consultation.”

Berdasarkan pasal diatas, untuk membangun pembangunan merata, maka Venezuela memerlukan pendapatan besar. Venezuela memiliki historikal dependensi terhadap sektor minyak. Berkali-kali minyak bisa membawa Venezuela ke dalam kemakmuran. Namun sayangnya pada pemerintahan Perez, minyak mengalami resesi harga. Sehingga terjadi krisis ekonomi di Venezuela. Chavez menyadari bahwa diperlukannya menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak agar bisa diolah secara maksimal dan pendapatan negara bisa terus molonjak. Sejak tahun 1970an, tambang-tambang minyak di Venezuela banyak dikuasai oleh perusahaan asing seperti Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Repsol, dan Chevron Corps. Perusahaan-perusahaan ini mayoritas adalah perusahaan asing yang dimodali oleh Amerika Serikat. Sebagai negara yang memerlukan pendapatan besar serta sebagai negara yang masih melakukan impor bahan pokok dan obat-obatan, Venezuela tentu juga memerlukan cadangan devisa yang besar. Untuk itu, Chavez mengambil langkah besar untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing dibawah PDVSA sebagai badan resmi negara. Sebelum mengalihkan perusahaan-perusahaan

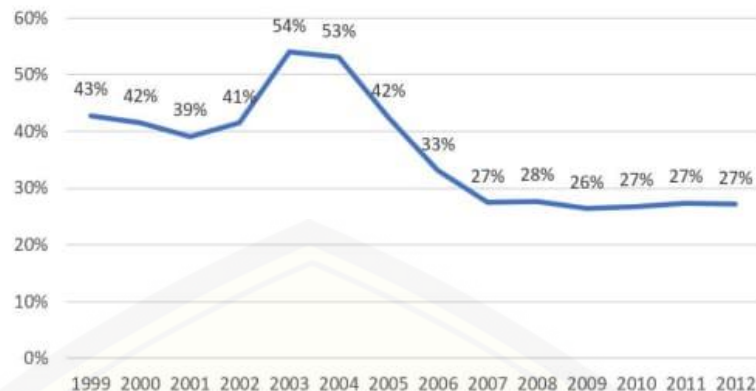
asing ini, Chavez melakukan nasionalisasi terhadap PDVSA terlebih dahulu. Pasalnya PdVSA awalnya adalah badan milih swasta di Venezuela (Afeb, 2012: 92).



Gambar 2.1 *Venezuela Oil Production and Prices*

Source : Torres, 2009. CSIS

Setelah melakukan nasionalisasi perusahaan minyak, ternyata pendapatan Venezuela terus mengalami peningkatan. Pasalnya terlihat pada gambar 2.1. Pasalnya pada tahun 2002 harga minyak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2008. Pendapatan besar ini juga diimbangi dengan tingkat produksi yang selalu berada di atas 2.4 mb/d. Sehingga pendapatan Venezuela dari sektor minyak, selalu mengalami peningkatan. Tahun 2010 harga minyak kembali mengalami peningkatan yaitu hampir menyentuh angka 80 USD. Tahun 2011 harga minyak terus mengalami peningkatan harga bahkan mencapai 100 USD.



Gambar 2.2 *Population Under Poverty Line in Venezuela*

Source : Torres, 2009. CSIS

Pendapatan tinggi sektor minyak ini, ternyata membawa angin segar untuk Venezuela. Kemiskinan yang awalnya mencapai 70 %, secara perlahan mulai menurun. Pada gambar 2.2 menunjukkan bahwa kemiskinan di Venezuela terus berkurang. Terlihat tingkat kemiskinan pada masa Chavez stabil diangka 27 %. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan ekspor minyak. Pendapatan ini lah yang kemudian diubah menjadi bantuan pendidikan dan berbagai macam subsidi. Maret 2008, Chavez juga mengembangkan nasionalisasinya ke bidang makanan. Tujuannya adalah ia ingin menjual makanan lebih murah kepada rakyat miskin.

2.2.3. Kondisi Hubungan Internasional

Memasuki abad-20, banyak negara di dunia mulai beralih menggunakan sistem kapitalis atau liberal untuk diterapkan kepada negaranya. Berbeda halnya dengan Venezuela. Chavez menjunjung tinggi asas sosialisme dan anti neo-liberalisme. Nasionalisasi yang banyak ia lakukan sangat menentang dan merugikan AS. Namun di samping itu pada masa kepemimpinan periode keduanya, ia mulai gencar dalam menjalin hubungan bilateral terutama pada kawasan Benua Amerika. Sebagai akibat dari nasionalisasi yang dilakukan Chavez, Venezuela dan AS sempat

memiliki hubungan yang tidak baik. Tapi Chavez mulai mencoba memperbaiki hubungan kedua negara dengan beberapa cara. Contohnya adalah Venezuela berperan aktif di dalam ALBA (Afeb, 2012). Pada September 2007, Venezuela beserta beberapa negara seperti Bolivia, Nikaragua, dan Kuba merencanakan untuk dibentuknya *Bank of Alba*. Pembuatan bank ini ditujukan untuk melepaskan ikatan dengan IMF dan juga *World Bank*. Bank ini akhirnya mulai beroperasi pada tahun itu juga. Setiap anggota diperkenankan untuk meminjam dana demi memperbaiki kondisi sosial maupun ekonomi negaranya masing-masing.

Selain ALBA, Venezuela menjalin hubungan baik dengan Kolombia. Pasalnya hubungan Venezuela dengan Kolombia sempat mengalami keretakan pada tahun 2006. Ketika Kolombia memiliki konflik dengan FARC, Venezuela mencoba memberikan bantuan kemanusiaan dengan cara mencoba bernegosiasi dengan FARC untuk membebaskan tawanan. Tahun 2010, Venezuela dan Kolombia memulai hubungan diplomatik. Chavez akan bertemu dengan Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos untuk membicarakan perdamaian di antara kedua negara (Suggett, 2010).

Dalam upaya mempererat hubungan bilateral antara Venezuela dengan Argentina, Ekuador, Brasil dan Bolivia maka Venezuela memberikan harga minyak murah untuk negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperkuat program-program sosial dari ALBA agar terhindar dari kapitalisme AS (Afeb, 2012: 138). Bahkan Ekuador dan Bolivia menjalin hubungan baik terkait energi, pendidikan dan sektor pertanian dengan Venezuela.

Venezuela memiliki hubungan baik dengan China terutama dalam hal pinjaman uang. Presiden Venezuela Nicolas Maduro Sebagai akibat dari harga minyak yang terus melemah, maka pendapatan Venezuela mengalami kemerosotan. Venezuela tergantung pada impor untuk bahan kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan yang terus mengalami kelangkaan. Pasalnya 96% mata uang asing untuk belanja

berasal dari ekspor minyak. China telah menyetujui pinjaman USD 42 miliar pada Venezuela. Selain itu, Maduro juga akan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi antara China dan komunitas negara Amerika Latin dan Karibia atau CELAC pada 8-9 Januari (Syarifudin, 2015).

Selain dengan China, Venezuela juga dekat dengan Rusia. Venezuela melakukan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan dengan kedua negara tersebut. Dari 2007 hingga 2015, Cina memberikan sekitar \$ 65 miliar dalam pembiayaan ke Venezuela. Uang itu biasanya digunakan untuk mendanai infrastruktur dan proyek pembangunan ekonomi lainnya dan Venezuela dilaporkan menggunakan sejumlah besar hasil minyak untuk membayar kembali pinjamannya ke Cina. Selain itu China secara resmi telah menyatakan dukungan berkelanjutan terhadap Venezuela.

Hubungan Venezuela dengan AS memang terkenal tidak baik. Namun keduanya mencoba untuk memperbaiki hubungan. Sayangnya, sejak awal kepemimpinan Maduro ketidakpercayaan terhadap AS muncul kembali. Venezuelapun dengan lantang menyatakan bahwa bahwa Venezuela tidak akan tunduk pada AS. Bahkan kedua negara saling usir diplomat masing-masing negara. Hal ini di karenakan pada tahun 2014, Venezuela mencurigai AS telah melakukan provokasi terhadap mahasiswa untuk melakukan aksi demo. Akhirnya Venezuela melakukan pengusiran tiga diplomat As. Sama dengan Venezuela, AS pun turut membalas usir tiga diplomat Venezuela (BBC News Indonesia, 2014). Tahun 2016, Maduro menyatakan kondisi darurat. Pasalnya ia mencurigai AS telah berencana untuk melakukan kudeta terhadapnya (Muhaimin, 2016).

BAB 3

KRISIS POLITIK DI VENEZUELA

Berdasarkan dari konsep krisis politik dari Jossep (2014) bahwa indikator sebuah pemerintahan mengalami krisis politik adalah bisa dilihat dari krisis legitimasi yang dialami, maka penulis akan menjabarkan mengenai bentuk-bentuk krisis politik yang dialami oleh Nicolas Maduro. Penulis membuat dua subbab yang terdiri dari masalah krisis politik domestik dan internasional sebagai berikut.

3.1 Krisis Politik dalam Lingkup Domestik

3.1.1 Demostrasi dan Percobaan Kudeta

Nicolas Maduro adalah presiden Venezuela setelah Hugo Chavez. Ia memenangkan pemilu pada tahun 2013. Maduro berhasil memenangkan pemilu dengan selisih perolehan suara 1,49 %. Kemenangannya atas Capriles ini, mendorong oposisi mengeluarkan pernyataan ketidakpercayaannya terhadap hasil pemilu. Pasalnya selisih suara sangatlah tipis. Sehingga oposisi mengajukan permohonan audit terhadap hasil pemilu kepada CNE¹⁴. Permohonan oposisi lantas dikabulkan oleh CNE. Setelah melalui tahap audit, CNE menyatakan bahwa total suara 99,98 % tidak ditemukan sebuah kecurangan (Sullivan, 2017). Mei 2013 Capriles mengajukan tuntutan kepada SCJ untuk mengadakan pemilu ulang dengan alasan adanya penyimpangan dalam pemilihan. Gejolak politik semakin memanas pada bulan Agustus 2013 dengan dikeluarkannya putusan SCJ yang menolak permohonan dari Capriles yang dianggap tidak menghormati lembaga-lembaga yang ada di Venezuela (Neuman, 2013).

¹⁴ CNE adalah salah satu dari lima cabang pemerintahan Republik Bolivarian Venezuela yang independen. Ini adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menjamin transparansi semua pemilihan dan referendum di Venezuela di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Pada bulan yang sama, Capriles mengumandangkan harapannya terhadap pemilihan kota tanggal 8 Desember mendatang sebagai pijakan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan Maduro. Harapan Capriles adalah agar ia memenangkan plebisit untuk menggulingkan pemerintahan Maduro (Pearson, 2013). Hasil pemilihan kota 2013 dimenangkan oleh PSUV dan sekutunya dengan jumlah 242 kotamadya, 75 untuk MUD, dan 18 kursi dimenangkan oleh independen. Dengan begitu PSUV bersama dengan Maduro mampu menguasai perpolitikan di Venezuela.

Namun pada tahun 2014 perlahan-lahan muncul sebuah reaksi secara simultan dari berbagai pihak terhadap kepemimpinan Maduro. Ditandai dengan munculnya demonstrasi terhadap Maduro yang terus meningkat. Februari 2014 demo yang berlangsung menewaskan 3 orang, 26 orang luka-luka dan 30 orang ditangkap. Pertentangan juga datang dari pihak oposisi yang menuntut Maduro meninggalkan jabatannya. Polaritas antara kedua pihak semakin menonjol. Pimpinan oposisi Leopoldo Lopez pun ditangkap dengan tuduhan konspirasi dan perencanaan kudeta terhadap pemerintah (BBC Indonesia, 2014). Sampai pertengahan Februari 2019 menurut organisasi HAM Venezuela Foro Penal tercatat setidaknya jumlah tahanan politik mencapai angka 918 (*Congressional Research Service*, 2019). . Demo terus menerus terjadi sampai tahun 2014 tercatat tahanan politik mencapai angka 918, penangkapan demonstran 3000 orang dan kematian mencapai ratusan orang (Sullivan, 2017).

Bahkan pada bulan Maret 2014 wali kota Chacao, Ramon Muchacho dituduh telah melakukan percobaan kudeta dan mendukung demonstran untuk melakukan kekerasan. Dua walikota oposisi lainnya juga ditahan seperti walikota oposisi San Cristobal, Daniel Ceballos sedang diselidiki karena adanya tuduhan pemberontakan dan konspirasi. Enzo Scarano, walikota San Diego, telah dipenjara karena gagal menjalankan perintah serupa dari Mahkamah Agung (Ryan, 2014). Adanya tindakan yang dinilai tidak demokratis ini mendorong demonstrasi berubah menjadi kekerasan,

dengan beberapa pengunjung rasa menyerang polisi dengan batu dan sebaliknya, polisi dilaporkan merespons dengan gas air mata dan meriam air.

Bahkan berkat adanya putusan SCJ untuk melucuti NA, terjadilah aksi demo yang menimbulkan 90 korban jiwa karena adanya tindakan kekerasan dari pasukan keamanan Negara Venezuela dan kelompok bersenjata warga sipil yang mendukung. Setidaknya 500 warga sipil diadili dihadapan pengadilan militer (Rivera, 2017).

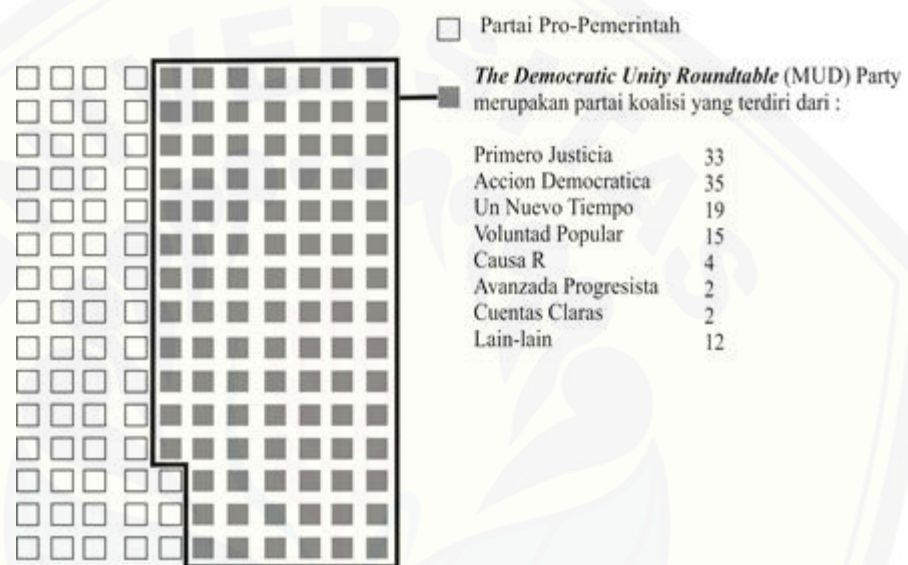
Adanya perilaku kekerasan pada masyarakat, mencerminkan konsep krisis politik yang dijelaskan oleh Jessop (2014) bahwa krisis politik bisa terjadi jika hilangnya legitimasi dan terjadinya hegemoni atas rakyat. Artinya kekuatan rakyat pada negara demokrasi telah hilang dan digantikan oleh kekuasaan elit.

3.1.2 Kekalahan PSUV

PSUV merupakan partai politik yang berkuasa di Venezuela. Pada Bulan Desember 2015 terdapat pemilihan legislatif di Venezuela. Ranah perpolitikan yang sebelumnya dikuasai PSUV, ternyata kini mulai berbalik. MUD berhasil memenangkan mayoritas kursi sebesar 109 kursi ditambah 3 perwakilan adat seperti yang tertera pada gambar 3.1. Sedangkan PSUV hanya memenangkan 55 kursi (Sullivan, 2017). Dengan memenangkan 112 kursi, artinya MUD berhasil mendapatkan 2/3 suara didalam NA. Artinya MUD memiliki wewenang untuk meminta referendum nasional, merubah dan menyetujui hukum, memberhentikan SCJ jika terlibat kasus berat tanpa harus meminta persetujuan jaksa agung, dan membantu majelis konstituante dalam menulis ulang konstitusi. Pemilihan ini diobservasi dan dikawal oleh perwakilan UNASUR saja karena Venezuela menolak adanya observasi dari internasional seperti Uni Eropa dan OAS.

Seperti yang terlihat pada gambar dibawah, maka sudah jelas PSUV telah kehilangan legitimasinya di Venezuela. Pasalnya kepercayaan rakyat

sudah mulai luntur dan mulai berbalik kepada oposisi. Hal ini bisa dikategorikan sebagai salah satu krisis politik di Venezuela karena PSUV sebagai partai pemegangan pemerintahan dan partai terbesar, harusnya mampu memenangkan pemilu legislatif untuk menyokong pemerintahan di Venezuela. Bahwasanya hasil keseluruhan juga menandakan 2/3 kursi telah dikuasai oleh oposisi.



Gambar 3.1 Hasil pemilihan umum legislatif Venezuela Desember 2015

Source : Statfor, 2015

Kekalahan PSUV ini merupakan sebuah krisis politik yang terjadi di Venezuela. Pasalnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin terlihat. Pada awal pemerintahan Maduro, PSUV memiliki legitimasi yang kuat dengan bukti bahwa adanya dukungan kuat dari rakyat. Namun kekal PSUV tahun 2015 ini mencerminkan adanya delegitimasi pada pemerintahan Maduro yang diusung oleh PSUV yang berakibat pada hilangnya kekuatan politik Maduro di Venezuela.

3.2 Krisis Politik dalam Lingkup Internasional

3.2.1 Sanksi dunia internasional kepada Venezuela

Sejak kekerasan yang dilakukan oleh Venezuela setelah demo pada Februari 2014, Venezuela menjadi sorotan dunia internasional karena menganggap tindakannya yang tidak demokratis. Setelah ditangkapnya Leopoldo Lopez yang ditahan atas tuduhan percobaan kudeta, AS menuntut Venezuela untuk membebaskan Leopoldo Lopez. Selain itu beberapa *International Human Group* mengkritik pemerintah telah melakukan pendekatan yang keras dalam menekan protes. Contohnya seperti AI mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia pada April 2014. Human Rights Watch mendokumentasikan 45 kasus yang melibatkan lebih dari 150 korban yang disebabkan oleh pasukan keamanan Venezuela menyalahi hak-hak para pemrotes.

Pada bulan Maret 2015, Presiden Obama mengeluarkan Executive Order (EO) 13692 untuk mengimplementasikan Venezuela dalam *Defense of Human Rights dan Civil Society Act 2014*. EO memberikan sanksi yang ditargetkan (pemblokiran aset dan pembatasan visa) terhadap mereka yang terlibat dalam hal berikut:

- a. tindakan atau kebijakan yang merusak proses atau lembaga demokrasi;
- b. tindakan kekerasan atau perilaku yang signifikan yang merupakan penyalahgunaan serius atau pelanggaran hak asasi manusia, termasuk terhadap orang-orang yang terlibat dalam protes anti pemerintah di Venezuela pada atau sejak Februari 2014.
- c. tindakan yang melarang, membatasi, atau menghukum pelaksanaan kebebasan berekspresi atau berkumpul secara damai, atau
- d. korupsi publik oleh pejabat senior di dalam pemerintah Venezuela.

Dalam menanggapi kepemimpinan otoriter dari Nicolas Maduro, Trump telah memperluas sanksi secara signifikan. Pada 22 Januari 2020, Departemen Keuangan telah memberlakukan sanksi terhadap 144 orang Venezuela. Departemen Luar Negeri juga telah mencabut visa ratusan individu dan keluarga mereka. Administrasi Trump juga telah memberlakukan sanksi terhadap perusahaan minyak negara Venezuela atau PdVSA, pemerintah, dan bank sentral.

Sanksi telah meningkatkan tekanan ekonomi pada pemerintahan Maduro dan mempercepat penurunan produksi minyak. Namun demikian, Maduro tetap berkuasa setahun sejak AS tidak lagi mengakuinya sebagai presiden. Trump itu telah berjanji untuk terus mendukung Presiden dari NA yaitu Juan Guaido. Setidaknya 57 pemerintah mengakui Guaido sebagai Presiden Venezuela sementara.

Adapun beberapa sanksi yang diberikan oleh Trump sebagai berikut:

- a. Agustus 2017, dia mengeluarkan E.O. 13808, yang melarang adanya akses ke AS. Contohnya seperti pasar keuangan oleh pemerintah Venezuela, termasuk PdVSA, dengan pengecualian tertentu untuk meminimalkan dampak pada kepentingan rakyat Venezuela.
- b. Maret 2018, Presiden Trump mengeluarkan E.O. 13827 untuk melarang transaksi melibatkan penerbitan mata uang digital pemerintah Venezuela, koin, atau token.
- c. 1 November 2018, Presiden Trump mengeluarkan E.O. 13850. E.O. ini menetapkan kerangka kerja untuk memblokir aset, dan melarang transaksi tertentu dengan, siapa pun yang ditentukan oleh Sekretaris Perbendaharaan untuk beroperasi di sektor ekonomi atau terlibat dalam transaksi korup dengan Pemerintah Maduro.
- d. 28 Januari 2019, sesuai dengan E.O. 13850, Perbendaharaan menunjuk PdVSA sebagai badan yang beroperasi di sektor minyak Ekonomi Venezuela, dan Sekretaris Departemen Keuangan Steven Mnuchin menetapkan bahwa perusahaan tersebut tunduk pada sanksi

AS. Akibatnya, semua properti dan kepentingan di properti PdVSA yang tunduk pada yurisdiksi AS.

e. Pada bulan April dan pada bulan September 2019, Departemen Keuangan memberikan sanksi pada perusahaan dan kapal yang terlibat dalam pengangkutan minyak Venezuela ke Kuba.

f. Pada 5 Agustus 2019, Presiden Trump mengeluarkan E.O. 13884 untuk membekukan properti dan kepentingan pemerintah Maduro di Amerika Serikat. Dibawah E.O ini juga akan sangat memungkinkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Venezuela, OFAC mengeluarkan lisensi otorisasi transaksi yang melibatkan pengiriman makanan, komoditas pertanian, dan obat-obatan, pengiriman uang, dan layanan komunikasi.

Delegitimasi yang dialami oleh Maduro terbukti bukan hanya datang dari dalam negeri. Sanksi-sanksi yang lontarkan dari dunia internasional merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan terhadap Maduro karena ia dianggap tidak berhasil dalam menegakkan demokrasi dan menjunjung tinggi HAM. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada Venezuela semata-mata karena adanya tuntutan untuk Maduro memperbaiki krisis politik dan kemanusiaan segera. Jika Maduro tidak mengabdikan tuntutan tersebut, maka sanksi inilah yang diharapkan dapat mendesak Maduro untuk segera meninggalkan jabatannya.

3.2.2 Penunjukan Juan Guaido sebagai Presiden Sementara

Tindakan Maduro yang dianggap tidak demokratis berakhir dengan diberikannya sanksi besar-besaran oleh dunia. Sanksi yang diberikan justru semakin melemahkan Venezuela dan menjadi perangkap tersendiri untuk krisis di Venezuela. Setelah muncul ketidakpercayaan dari rakyat maupun dunia internasional, pada Januari 2019 AS beserta 53 negara (mayoritas UE, 15 negara belahan barat, Australia, dan Jepang) menunjuk Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela secara sepihak (*Congressional Research Service*, 2019).

Penunjukan ini tentu tanpa persetujuan dari Maduro. Penunjukan secara sepihak ini dipandang sebagai cara ilegal untuk merebut pemerintahan. Sedangkan menurut Juan Guaido, penunjukan oleh lebih dari 60 negara adalah keputusan yang bisa menjadikannya presiden sementara secara sah.

Dengan adanya perebutan kekuasaan diantara kedua pihak, seperti yang diungkapkan oleh Jessop (2014) maka Venezuela sedang mengalami krisis politik. Pasalnya terdapat percobaan kudeta dan adanya perebutan kekuasaan dari dua blok kekuatan di Venezuela.

Penunjukan secara sepihak ini tentu saja sangat mencerminkan sebuah krisis politik yang dialami Venezuela. Pasalnya pemerintah yang seharusnya memegang kendali atas perpolitikan ataupun memiliki kekuatan legitimasi, sudah tidak dimiliki oleh Maduro. Penunjukan ini jelas menunjukkan bahwa sebagai pemerintah, ia sudah tidak diakui oleh dunia dan telah kehilangan legitimasinya baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

BAB 5

KESIMPULAN

Venezuela merupakan negara sosialis demokratis dengan berlandaskan pada Konstitusi Republik Bolivarian Venezuela. Venezuela adalah negara yang berorientasi pada pendapatan sektor minyak untuk melakukan pembangunan demi mensukseskan visi-misi sosial dari Revolusi Bolivarian. Belum genap satu tahun menjabat menjadi Presiden, Maduro mendapatkan dorongan untuk meninggalkan jabatannya. Krisis politik mulai nampak dipermukaan ditandai dengan tingginya intensitas demo untuk menuntut Maduro meninggalkan jabatannya dan kekalahan PSUV untuk menduduki *National Assembly*. Bahkan dunia internasional juga mengangkat Juan Guaido sebagai Presiden Sementara Venezuela secara sepihak tanpa persetujuan dari Maduro. Delegitimasi inilah yang menjadi sebuah indikator adanya krisis politik di Venezuela.

Presiden Nicolas Maduro sebagai aktor negara yang memimpin rakyat Venezuela seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk mengelola seluruh sumber daya pembangunan berdasarkan norma dan prinsip-prinsip untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Venezuela. Namun ternyata penelitian ini justru menemukan sejumlah referensi yang membuktikan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan krisis politik di Venezuela pada kepemimpinan Nicolas Maduro. Bahwasanya sekurang-kurangnya ada lima faktor yang menyebabkan krisis politik yang akut terjadi di Venezuela. Lima faktor tersebut adalah Kutukan Sumber Daya dan *Paradox of Plenty*, Krisis Pembangunan, Krisis Struktural, Krisis Manajemen, dan Krisis Legitimasi. Venezuela yang dikaruniai sumber daya minyak sangat berlimpah nyatanya di bawah Presiden Maduro tidak mampu membawa rakyat Venezuela menjadi lebih sejahtera. Selain itu adanya kesalahan tata kelola sumber daya (Krisis Manajemen), justru menjadikan sumber daya minyak seperti menjadi kutukan untuk

negara. Suatu ironi tata kelola pembangunan atau sebuah *paradox of plenty*. Jadi, krisis politik ini bisa dikatakan berasal dari akumulasi lima faktor yang tidak kunjung terselesaikan oleh pemerintahan Nicolas Maduro.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beetham, David. 1991. *The legitimation of Power*. New York: Palgrave Macmillan. Brown, Matthew. 2009. *Bolivarian Revolution*. New York: Verso.
- Boediono. 1981. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Cichocki, Marek A dan Tomasz Grzegorz Grosse. 2013. *The Aspects of a Crisis : An analysis of Crisis Management From an Economic and Political Perspective*. Warszawa: Natolin European Centre.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. California: Sage Publications.
- Easton, David. 1957. *An approach to The Analysis of Political Systems*. World Politics: 383-400.
- Herdecke. 2016. *Conceptualizing Political Legitimacy: A comparative Analysis of The Turkish Justice and Development Party From 2002 Until 2015*. Witten University
- Keohane, Robert O & Nye, Joseph S. 2012. *Power & Interdependence*. 4th ed. Boston: Longman.
- Levin, Judith. 2007. *Hugo Chavez*. New York: Infobase Publishing.
- O'Neil, P. H. 2010. *Essentials of Comparative Politics (Third ed.)*. London: W. W. Norton & Company Ltd.
- Roayidin, Mohamad. 2016. *Global Strategis*. Universitas Diponegoro.
- Seawright, Jason. 2012. *Party-System Collapse: The Roots of Crisis in Peru and Venezuela*. California : Stanford University Press.
- Tarver, H. Micheal & Julia C. Fredrick. 2005. *The History of Venezuela*. London: Greenwood.
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ungpakorn, Giles Ji. 2007. *A Coup For the Rich Thailand's Political Crisis*. Thailand: Workers Democracy Publishing.

Weber, Max. 1978. *Economy And Society: an Outline of Interpretive Sociology (Vol. 1)*. Berkeley, Los Angeles, London: University of Calif. Press.

Jurnal dan Report

Dary, Nida Hanin. 2017. Penyelesaian Sengketa Venezuela Dengan Exxon Mobil, Studi Kasus Nasionalisasi Proyek Eksplorasi Minyak Cerro Negro di Orinoco Belt dalam Arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) pada Tahun 2008-2011. *Jurnal HI UNS*.

Ishaka, Dele. 2017. Over-Dependence on Oil and its Implication for Development in Nigeria. *HUMASS: McU Journal of Humanities, Management, Applied & Social Sciences*.

Jessop, Bob. 2014. Political Capitalism, Economic and Political Crises, and Authoritarian Statism. *Spectrum Journal of Global Studies: Vol 7*.

MacNeill, Maureen. 2018. *2017 Annual Report*. Austria: Grasl Druck & Neue Medien GmbH.

MacNeill, Maureen. 2019. *2018 Annual Report*. Austria: Medienfabrik Graz GmbH.

Rivera, Alejandro Salinas. 2017. The Supreme Court of Justice of Venezuela: an Instrument of the Executive Branch. *International Commission of Jurists: Switzerland*.

Seelke, Clare Ribando. 2019. Venezuela: Political Crisis and U.S Policy. *Congressional Research Service*.

Seelke, Clare Ribando. 2020. Venezuela: Overview of U.S. Sanctions. *Congressional Research Service*.

Sullivan, Mark P. 2017. Venezuela: Issues for Congress, 2013-2016. *Congressional Research Service*.

Sullivan, Mark P. 2009. Venezuela: Political Conditions and U.S. Policy. *Congressional Research Service*.

Skripsi

Andrianto, Afeb. 2012. Kebijakan-Kebijakan Pemerintahan Hugo Chavez di Venezuela (1999-2011). Program Studi Pendidikan Sejarah

Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Internet

Agustiyanti. 2017. Krisis dan Lilitan Utang Venezuela, Si Negara Kaya Minyak. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171104204809-78-253511/krisis-dan-lilitan-utang-venezuela-si-negara-kaya-minyak> [Diakses pada 23 September 2019].

Barreto, Juan. 2017. Venezuela Devaluasi Mata Uang untuk Hadapi Krisis. <https://mediaindonesia.com/read/detail/107100-venezuela-devaluasi-mata-uang-untuk-hadapi-krisis> [Diakses pada 5 Oktober 2019].

BBC. 2017. La oposición de Venezuela llama a desobedecer la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro y denuncia "fraude constitucional". <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39775562> [Diakses pada 1 Mei 2019].

BBC. 2017. What has Venezuela's constituent assembly achieved?. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-41094889> Diakses pada 20 September 2019.

BBC. 2019. Krisis Venezuela: Maduro Blokir Bantuan, Kota Perbatasan Rusuh . <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47347489> [Diakses pada 20 Oktober 2019].

BBC. 2019. Venezuela: AS jatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak BUMN. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47037766> [Diakses pada 25 Oktober 2019].

BBC Indonesia. 2018. Venezuela Bakal Menghadapi Krisis Pengungsi Seperti di Kawasan Laut Tengah. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45305807> [Diakses pada 1 April 2019].

BBC News Indonesia. 2014. Tiga diplomat Venezuela diusir dari Amerika Serikat. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/02/140226_venezuela_a_merika_serikat [Diakses Pada 9 Maret 2019].

BBC News Indonesia. 2018. Bagaimana Venezuela Yang Kaya Minyak Tapi Mata Uangnya Ambruk. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45272065> [Diakses pada 9 Maret 2019].

- Boothroyd, Rachel. 2015. Major Progressive Tax Reforms in Venezuela Start to Bear Fruit. <https://venezuelanalysis.com/news/11342> [Diakses pada 22 September 2019].
- Brodzinsky, Sibylla. 2016. Venezuela President Declares Economic Emergency as Inflation Hits 141%. <https://www.theguardian.com/world/2016/jan/16/venezuela-president-declares-economic-emergency-as-inflation-hits-141> [Diakses pada 20 September 2019].
- Dreier, Hannah dan Fabiola Sanchez. 2017. Venezuela High Court Reverses Move to Strip Congress' Power. <https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/04/01/venezuela-high-court-reverses-move-strip-congress-power/99904910/> [Diakses pada 22 September 2019].
- Ellis, R. Evan. 2017. The Collapse of Venezuela and Its Impact on the Region. <http://www.addisonlibrary.org/sites/default/files/The%20Collapse%20of%20Venezuela.pdf> [Diakses pada 30 April 2019].
- English. Telesur. 2015. Venezuela Rejects Statement by Argentina's President. <https://venezuelanalysis.com/news/11786> [Diakses Agustus 2019]
- Febrian, Alfin. 2019. Kebijakan Subsidi dan Hancurnya Ekonomi-Politik Venezuela. <https://www.kompasiana.com/alfinfebrian/5c690e98aeebe1121a6625c3/kebijakan-subsidi-dan-hancurnya-ekonomi-politik-venezuela?page=all> [Diakses pada 6 Oktober 2019]
- International Monetary Fund. 2019. Inflation rate, end of period consumer prices: Annual percent change. <https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/VEN?zoom=VEN&highlight=VEN> [Diakses 20 Oktober 2019].
- International Monetary Fund. 2019. *Real GDP growth Annual percent change*. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/VEN?year=2019 [Diakses pada 22 September 2019].
- Kurnia, Tommy. 2018. Terpuruk Krisis, Rakyat Venezuela Kini Pilih Membeli Kebutuhan Melalui Sistem Barter. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3631044/terpuruk-krisis-rakyat-venezuela-kini-pilih-membeli-kebutuhan-melalui-sistem-barter> [Diakses pada 5 Oktober 2019].

- Mallett, Ryan. 2016. Venezuela's National Assembly Declares Supreme Court Unconstitutional. <https://venezuelanalysis.com/news/12087> [Diakses pada 20 September 2019].
- Mallett, Ryan. 2014. Venezuela's Maduro Accuses Opposition Mayor of Supporting Violence. <https://venezuelanalysis.com/news/10516> [Diakses Agustus 2019]
- Martinez, Elizabeth & Arnoldo Garcia. 1997. What is “Neoliberalism”?, <https://corpwatch.org/article/what-neoliberalism> [Diakses pada 1 April 2019].
- Maulana, Victor. 2014. Maduro Temui Oposisi Untuk Akhiri Krisis di Venezuela. <https://international.sindonews.com/read/852278/42/maduro-temui-oposisi-untuk-akhiri-krisis-di-venezuela-1397029255> [Diakses Pada 9 Maret 2019].
- Muhaimin. 2014, Februari 13. Venezuela rusuh, Maduro: Tak ada kudeta !. <https://international.sindonews.com/read/835325/42/venezuela-rusuh-maduro-tak-ada-kudeta-1392262413> [Diakses pada 9 Maret 2019].
- Muhaimin. 2016. Curiga AS Rencanakan Kudeta, Presiden Venezuela Nyatakan Darurat. <https://international.sindonews.com/read/1108457/42/curiga-as-rencanakan-kudeta-presiden-venezuela-nyatakan-darurat-1463199595> [Diakses pada 20 Januari 2020]
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2018. Krisis Venezuela dan Migrasi Internasional. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-18-II-P3DI-September-2018-160.pdf [Diakses pada 1 April 2019].
- Neuman, William. 2013. Court Rejects Vote Challenge in Venezuela. <https://www.nytimes.com/2013/08/08/world/americas/venezuelan-court-rejects-challenge-to-presidential-election-results.html> [Diakses pada 20 September 2019].
- NPR. 2019. How Venezuela's Currency Became So Worthless. <https://www.npr.org/2019/04/08/711169832/how-venezuelas-currency-became-so-worthless> [Diakses pada 23 September 2019].

- OPEC. 2017. OPEC Share of World Crude Oil Reserves. https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm [Diakses pada 1 April 2019].
- OPEC. 2019. Brief History. https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm [Diakses 9 Maret 2019].
- Ore, Diego. 2015. Venezuela's outgoing Congress names 13 Supreme Court justices. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuelas-outgoing-congress-names-13-supreme-court-justices-idUSKBN0U626820151223> [Diakses pada 20 September 2019].
- Pearson, Tamara. 2013. Spinning Venezuela's Municipal Elections. <https://venezuelanalysis.com/analysis/10057> [Diakses pada 20 September 2019].
- Priyambodo. 2017. AS Tidak Akui Majelis Konstituante Venezuela. <https://www.antaraneews.com/berita/644694/as-tidak-akui-majelis-konstituante-venezuela> [Diakses pada 25 November 2019].
- Romo, Rafael. 2017. Venezuela's High Court Dissolves National Assembly. <https://edition.cnn.com/2017/03/30/americas/venezuela-dissolves-national-assembly/index.html> [Diakses pada 22 September 2019].
- Sari, Amanda Puspita. 2015. Perang Dingin Venezuela-AS Kembali Mencuat. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150313003903-134-38825/perang-dingin-venezuela-as-kembali-mencuat> [Diakses pada 9 Maret 2019].
- Syarifudin, 2015. Venezuela Minta Bantuan Keuangan China. <https://ekbis.sindonews.com/read/946571/150/venezuela-minta-bantuan-keuangan-china-1420516747> [Diakses pada 24 Januari 2020]
- Sequera, Vivian. 2018. Venezuelans report big weight losses in 2017 as hunger hits. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-food/venezuelans-report-big-weight-losses-in-2017-as-hunger-hits-idUSKCN1G52HA> [Diakses pada 8 Oktober 2019].
- Sofwan, Rinaldy. 2018. Maduro Menangi Pemilu Kontroversial Venezuela. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180521101800-134->

- 299900/maduro-menangi-pemilu-kontroversial-venezuela [Diakses pada 1 April 2019].
- Suggett, James. 2010. Chavez to Meet with Santos to Renew Venezuela-Colombia Relations. <https://venezuelanalysis.com/news/5557> [Diakses 2 Agustus 2019]
- Thea, Ady. 2010. Venezuela: Gerak Menuju Sosialisme (Bagian Satu). <https://www.militanindonesia.org/> [Diakses pada 2 Agustus 2019].
- Torres, Gerver. 2019. The Venezuelan Drama in 14 Charts. <https://www.csis.org/analysis/venezuelan-drama-14-charts> [Diakses pada 20 Oktober 2019].
- UNASUR. 2011. Historia. <https://www.unasursg.org/es/historia> [Diakses Pada 8 Maret 2019].
- UNASUR. 2015. Sanksi Terhadap Venezuela Adalah Pesan Buruk. <https://www.unasursg.org/es/node/163> [Dikases pada 9 Maret 2019].
- UNDP. 2018. Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf [Diakses pada 19 Juni 2019].
- UNFPA. 2017. Worlds Apart: Reproductive Health and Rights in an Age of Inequality. The State of World Population 2017: Prographic, Inc. https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/State_of_World_Population_Report_SWOP_2017.pdf [Diakses pada 19 Juni 2019].
- Wardhana, Esnoe Faqih. 2013. AS Minta Hasil Pilpres Venezuela Diaudit. <https://international.sindonews.com/read/738443/42/as-minta-hasil-pilpres-venezuela-diaudit-1366056936> [Diakses Pada 22 Februari 2019].
- Venezuelanalysis.com. no date. Institution - Title V: Organization of national public authority (Art. 186-298). <https://venezuelanalysis.com/constitution/title/5> [Diakses pada 21 September 2019].

LAMPIRAN

Lampiran 1

Venezuela (Bolivarian Republic of)'s Constitution of 1999 with Amendments through 2009

TITLE I: FUNDAMENTAL PRINCIPLES

Article 1

The Bolivarian Republic of Venezuela is irrevocably free and independent, basing its moral property and values of freedom, equality, justice and international peace on the doctrine of Simon Bolivar, the Liberator. Independence, liberty, sovereignty, immunity, territorial integrity and national self-determination are unrenounceable rights of the Nation.

Article 2

Venezuela constitutes itself as a Democratic and Social State of Law and Justice, which holds as superior values of its legal order and actions those of life, liberty, justice, equality, solidarity, democracy, social responsibility and, in general, the preeminence of human rights, ethics and political pluralism.

Article 3

The essential purposes of the State are the protection and development of the individual and respect for the dignity of the individual, the democratic exercise of the will of the people, the building of a just and peace loving society, the furtherance of the prosperity and welfare of the people and the guaranteeing of the Fulfillment of the principles, rights and duties established in this Constitution. Education and work are the fundamental processes for guaranteeing these purposes.

TITLE IV: PUBLIC POWER**Chapter I: Fundamental Provisions****Section One: General Provisions**

Article 136

Public Power is distributed among Municipal Power, that of the States Power and National Power. National Public Power is divided into Legislative, Executive, Judicial, Citizen and Electoral. Each of the branches of Public Power has its own functions, but the organs charged with exercising the same shall cooperate with one another in attaining the ends of the State.

TITLE VI: SOCIOECONOMIC SYSTEM**Chapter I: Socioeconomic Order and the Function of the State in the Economy**

Article 299

The economic regime of the Bolivarian Republic of Venezuela is based on the principles of social justice, democratization, efficiency, free competition, protection of the environment, productivity and solidarity, with a view to ensuring overall human development and a dignified and useful existence for the community. The State, jointly with private initiative, shall promote the harmonious development of the national economy, to the end of generating sources of employment, a high rate of domestic added value, raising the standard of living of the population and strengthen the economical sovereignty of the country, guaranteeing the reliability of the law; the solid, dynamic, sustainable, continuing and equitable growth of the economy to ensure a just distribution of wealth through participatory democratic strategic planning with open consultation.